

LITERASI KEAGAMAAN

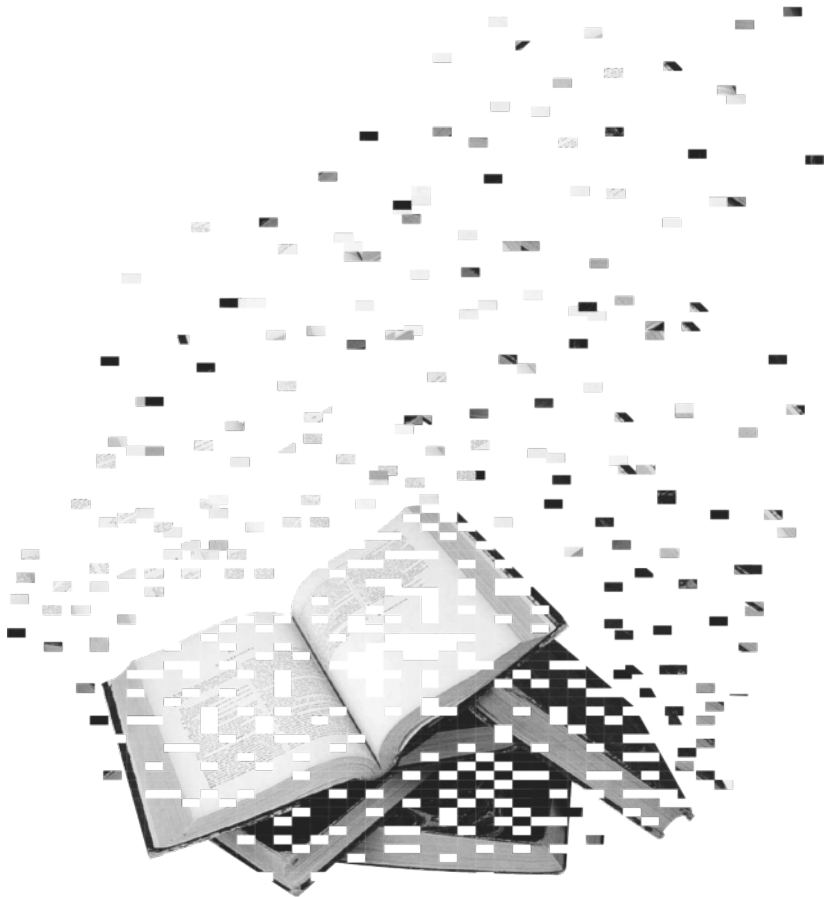
TAKMIR MASJID, IMAM, DAN KHATIB



CONVEY Indonesia
CSRC UIN Jakarta - PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia

LITERASI KEAGAMAAN

TAKMIR MASJID, IMAM, DAN KHATIB



CONVEY Indonesia
CSRC UIN Jakarta - PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia

CONVEY REPORT

LITERASI KEAGAMAAN
TAKMIR MASJID, IMAM, DAN KHATIB
Vol. 2 | No. 1 | Tahun 2019

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; CSRC UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis:

Ahmad Gaus AF, Irfan Abubakar

Peneliti:

Irfan Abubakar (Koordinator)
Abdul Wahid, Fahmi Syahirul Alim, Idris Hemay, Moh. Nabil,
Muchtadlirin, Nurchalis Sofyan, Ubed Abdillah Syarif.

Penyelaras Bahasa:

Junaidi Simun

Layouter:

Hidayat alfannanie

Penerbit:

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC)
Pusat Kajian Agama dan Budaya
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat Timur 15419

Telepon. 021-744 5173. Fax. 021-749 0756

Email: info@csrc.or.id

Website: www.csrc.or.id

ACKNOWLEDGEMENT

Laporan Convey ini didasarkan pada hasil *needs assesment* yang berfokus pada potret literasi keagamaan di masjid-masjid di tujuh kota yakni: Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Garut-Tasikmalaya, Manado, Ambon, dan Mataram. Banyak pihak yang telah berperan dengan caranya masing-masing sehingga Laporan Convey ini dapat disajikan dengan baik ke hadapan pembaca. Untuk itu kami ingin menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

PPIM UIN Jakarta, karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menuliskan Laporan Convey ini. Selain itu, PPIM UIN Jakarta telah mendukung kegiatan *needs assesment* yang menjadi dasar tulisan ini, bukan hanya dalam bentuk pendanaan, melainkan juga masukan-masukan konstruktif untuk kesuksesan riset tersebut.

UNDP Indonesia, atas dukungan yang juga tidak kalah penting dalam kesuksesan penelitian dan penulisan laporan ini. Bersama dengan PPIM UIN Jakarta, tim UNDP Indonesia bukan hanya memberikan kontribusi finansial melainkan juga masukan-masukan teknis-konseptual sejak di fase perencanaan program hingga penulisan laporan hasil *needs assesment* ini.

CSRC UIN Jakarta, atas semua dedikasi dan kerja keras yang dicurahkan dalam mengorganisasikan kegiatan literasi keagamaan untuk takmir masjid, imam, dan khatib di semua tahapannya, termasuk *needs assesment*. Tim manajemen dan para peneliti layak mendapatkan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerja-kerja akademik selama pengumpulan data, analisis data hingga penulisan laporan. *insights* yang diperoleh dari laporan *needs assesment* yang mereka hasilkan menjadi sumber inspirasi bagi penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

ACKNOWLEDGEMENT | 1

RINGKASAN EKSEKUTIF | 3

A. LATAR BELAKANG | 6

B. METODOLOGI | 12

C. LITERASI KEAGAMAAN MASJID DI TUJUH KOTA | 15

D. KESIMPULAN | 42

DAFTAR PUSTAKA | 45

PROFIL PENULIS | 47

TENTANG CSRC | 49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Needs assesment ini berfokus pada potret literasi keagamaan di masjid-masjid di tujuh kota yakni: Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Garut-Tasikmalaya, Manado, Ambon, dan Mataram, dalam kaitannya dengan moderasi Islam. Tema-tema yang dimunculkan dalam penelitian ialah toleransi (antaragama dan intra umat Islam), perdamaian, dan anti-kekerasan, yang lazim disarikan dari ajaran al-Quran sendiri: Islam *rahmatan lil-'alamin* (Islam sebagai agama yang penuh kasih kepada semua). Ajaran tersebut sangat populer dan mudah dipahami. Namun dalam implementasinya, seperti terbaca dari hasil penelitian ini, para takmir tidak selalu memiliki wawasan untuk menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam aktivitas literasi keagamaan mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa literasi keagamaan di masjid-masjid masih bercorak konvensional, yaitu dalam media pengajian, khutbah, dan ceramah. Begitu pula muatannya yang secara garis besar mengarah ke pengajaran akidah dan fikih dalam arti konvensional. Yakni, untuk kebutuhan praktik ibadah sehari-hari. Jarang sekali ditemukan literasi keagamaan yang secara khusus mengarah kepada syiar atau dakwah Islam *rahmatan lil-'alamin*. Berbagai kegiatan semisal khutbah, ceramah, dan pengajian, pada umumnya berjalan apa adanya. Dalam arti tidak dirancang secara khusus untuk mempromosikan Islam *rahmatan lil-'alamin*.

Literasi keagamaan yang berkaitan dengan masalah *hablun minannas* (hubungan horizontal sesama manusia) lebih banyak didominasi oleh tema *ukhuwah islamiyyah*, dan sedikit yang terkait dengan *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan). Tema-tema kebangsaan seperti soal NKRI, Pancasila, Kebhinnekaan, kerap disampaikan melalui kegiatan ceramah, tapi tidak menjadi silabus resmi. Begitu juga tema-tema hubungan antaragama seperti pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan anti-kekerasan, hanya menjadi tema-tema yang lepas. Dalam arti, diserahkan kepada kreativitas para penceramah.

Literasi keagamaan di masjid-masjid tidak menjadi perhatian khusus dari

kantor Kementerian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia. Maka manajemen literasi keagamaan berjalan secara apa adanya nyaris tanpa pembinaan yang memadai. Salah satu sarana penunjang literasi keagamaan, yakni perpustakaan, tidak ditemukan di masjid-masjid yang diteliti, kecuali pada satu dua masjid saja.

Pola perekrutan narasumber penceramah/khatib biasanya melalui rapat pengurus atau membicarakan dengan dewan penasihat masjid. Tidak jarang rapat tersebut mencoret nama tertentu yang diajukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, misalnya karena penceramah/khatib yang berkecenderungan radikal. Penelitian ini menemukan bahwa masjid-masjid pada umumnya menolak isu-isu politik dibawa ke masjid karena akan memecah-belah umat. Para takmir juga memiliki peraturan tidak tertulis bahwa para penceramah atau khatib tidak boleh membahas satu madzhab tertentu, tidak boleh berbicara SARA, dan tidak boleh menghujat kelompok atau agama lain.

Terkait isu-isu kebangsaan seperti Pancasila sebagai ideologi negara, para takmir, imam dan khatib nyaris tidak ada perbedaan. Mereka sepakat menerima karena Pancasila dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Begitu pula isu hubungan antaragama yang dinilai penting untuk terus dipupuk dan dijaga. Doktrin yang dipegang oleh semua takmir, khatib, dan imam ialah ayat al-Qur'an *lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Namun untuk kasus Syiah, Salafi, Islam Liberal, dan Islam Nusantara, pandangan para takmir, khatib, dan imam berbeda-beda. Sebagian besar mereka menolak, sebagian kecil memberi toleransi dengan syarat tertentu. Khusus untuk kasus Ahmadiyah semuanya sepakat untuk menolak karena dianggap menyimpang dari Islam.

Sebagian masjid memiliki organisasi remaja masjid atau ikatan remaja masjid, namun sebagian besar tidak memilikinya. Akibatnya kaum muda jarang terlibat dalam aktivitas literasi masjid. Pada saat bersamaan aktivitas literasi masjid cenderung monoton dan tidak menarik minat kaum muda. Namun demikian terdapat sejumlah *best practices* bagi literasi keagamaan kaum muda seperti organisasi Remaja Masjid Raya Bintaro dan Masjid Sunda Kelapa di Jakarta. Sementara itu Ikatan Pemuda Remaja Assalam (IPRA) di Manado bergerak di luar masjid, karena memang bukan organisasi remaja masjid, namun memiliki aktivitas yang melibatkan kaum muda dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Di Banda Aceh, dimana tidak ada organisasi remaja masjid,

kaum muda lebih banyak menghabiskan waktunya di warung kopi. Bahkan para takmir masjid pun berbaaur dengan kaum muda di warung-warung kopi khususnya sehabis shalat subuh. Dalam situasi yang bersahabat dan tidak formal, kaum muda lebih mudah diajak berdiskusi. Jadi warung kopi merupakan tempat yang cocok untuk literasi keagamaan. Di daerah-daerah lain nyaris tidak ditemukan *best practices*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang diajukan terhadap para pemangku kepentingan terkait dengan literasi keagamaan di masjid:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenag harus mengeluarkan Peraturan yang jelas terkait masjid dan perangkatnya (takmir, imam, khatib). Saat ini baru dikeluarkan Surat Keputusan dari Dirjen Bimas Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 Tertang Standar Pembinaan Manajemen Masjid yang masih bersifat normatif dan belum menyentuh hal substansial.
2. Pemerintah dan para *stakeholders* perlu melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap takmir-takmir masjid dalam hal manajemen atau pengelolaan sehingga masjid bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi kegiatan-kegiatan sosial dan keilmuan.
3. Para takmir hendaknya melibatkan kaum muda dalam aktivitas literasi keagamaan mereka; dan lebih baik bila setiap masjid memiliki organisasi remaja masjid sebab dengan cara begitu kaum muda dapat membuat sendiri aktivitas-aktivitas literasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalaupun tidak memiliki organisasi remaja masjid, para takmir dapat melakukan inovasi dalam aktivitas literasi keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kaum muda.
4. Pemerintah dan para *stakeholders* hendaknya melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap takmir-takmir masjid, khususnya dalam hal pengembangan pengetahuan dan wawasan dalam isu-isu toleransi, perdamaian, dan amti-kekerasan untuk menunjang tegaknya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Demikian juga wawasan mereka mengenai dakwah bernuansa milenial yang masih memerlukan pembekalan baik dari sisi materi maupun metode.

A. LATAR BELAKANG

Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan oleh laporan Badan Intelijen Negara (BIN) tentang 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Laporan tersebut berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), yang disampaikan kepada BIN sebagai peringatan dini (*early warning*) untuk ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan. Kategori radikalisme dalam survei tersebut dilihat dari konten yang dibawakan oleh para penceramah. Ditengarai bahwa terdapat sekitar 50 penceramah dengan konten yang menjurus ke arah radikalisme, dan mereka sangat aktif di masjid-masjid sebagai pendakwah.

Temuan ini cukup mengagetkan karena terjadi di masjid-masjid di lingkungan pemerintah yang seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal. Dalam hitungan saat ini terdapat 100 masjid yang dimiliki gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN. Berdasarkan pemetaan survei, dari 41 masjid yang terpapar paham radikal tersebut, 17 masjid berkategori tinggi/berat, 17 masjid berkategori sedang, dan 7 masjid kategori rendah. Kategori radikal berat itu misalnya penceramah di masjid bersangkutan mendukung Islamic State (dulu ISIS) dan menyerukan kaum Muslim untuk berjihad di Suriah dan Marawi (kota yang pernah dikuasai oleh ISIS di Filipina).¹

Lebih dulu dari survei P3M tersebut adalah survei Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dilakukan pada 2008-2009 dan hasilnya dipublikasikan pada 2010 dalam sebuah buku berjudul: *Benih-benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo* (Al-Makassari & Ahmad Gaus AF, 2010). Survei P3M di atas mengkonfirmasi hasil survei CSRC sepuluh tahun sebelumnya. Dalam survei yang berjudul “Pemetaan Ideologi Masjid di DKI Jakarta dan Solo” itu CSRC juga menemukan adanya upaya infiltrasi masjid oleh gerakan Islam radikal.

¹ Indonesia mosques spreading radicalism to government workers: Official, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/19/indonesia-mosques-spreading-radicalism-to-government-workers-official.html>, November 19, 2018, 06:31 pm, diakses 19 Januari 2019.

Di antara narasi yang dikembangkan oleh gerakan ini ialah penolakan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, pendirian khilafah *islamiyah*, dan pemberlakuan syariat Islam dalam konstitusi negara.

Pada umumnya, dengan variasi yang berbeda, gerakan Islam radikal tersebut mengusung ideologi Islam salafi. Ideologi salafi merupakan paham yang berupaya meniru secara harfiah tradisi Nabi Muhammad dan para Sahabat, tentu dengan interpretasi mereka sendiri. Karena itu pemurnian ajaran agama atau purifikasi menjadi agenda penting gerakan ini. Karena mereka beranggapan Islam saat ini sudah tidak murni alias telah diselewengkan oleh kekuatan anti-Islam baik dari dalam maupun dari luar atau dunia Barat (Mulkhani & Singh, 2011).

Belakangan gerakan ideologi ini tidak hanya berhenti sebagai gerakan purifikasi keagamaan, namun menjelma sebagai gerakan perlawanan atas segala paham yang berbeda dengan paham mereka (Jamhari & Jajang, 2004). Gerakan tersebut juga memperjuangkan agenda yang berbeda dengan agenda mayoritas masyarakat Islam Indonesia yang telah menganggap final Pancasila sebagai ideologi dan NKRI sebagai bentuk negara. Kaum salafi sangat mudah mengkafirkan orang lain, sementara kaum Muslim Indonesia mayoritas berhaluan moderat, tidak mudah memandang yang lain sebagai kafir atau sesat—sebagaimana direpresentasikan oleh dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah (KH Abdurrahman Wahid, 2009).

Lebih dari itu, kaum salafi juga sangat militan dalam menyebarluaskan ide-ide dan ajarannya. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok Islam moderat, yang diwakili Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, seperti kehabisan daya dan energi dalam menjaga dan merawat moderatisme Islam. Pertahanan utama mereka, yakni masjid bagi NU dan hasil amal usaha bagi Muhammadiyah, juga telah berhasil diinfiltrasi oleh kelompok-kelompok radikal tersebut (KH Abdurrahman Wahid, 2009; al-Makassary dan Ahmad Gaus AF, 2010). Karena itu, untuk tujuan memagari masjid-masjid milik NU, Bahtsul Masail PB NU tahun 2007 merekomendasikan perlunya sertifikasi masjid-masjid NU. Sementara itu, PP Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan No. 149, 1 Desember 2006 yang bertujuan menjaga hasil amal usaha Muhammadiyah (sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan universitas) agar tidak disusupi oleh kelompok dakwahis dan partai politik tertentu yang memperjuangkan agenda dan ideologi yang berbeda.

Survei P3M baru-baru ini -yang dikemukakan di atas telah mengkonfirmasi temuan-temuan CSRC dalam riset sebelumnya (2008-2009). Hal ini menunjukkan bahwa gerakan radikal tidak kunjung surut. Bahkan dalam situasi kebebasan politik yang luas pasca reformasi, gerakan-gerakan ini tampaknya lebih leluasa mempromosikan ide-idenya tanpa interupsi yang berarti dari negara dan ormas Islam yang berhaluan moderat.

Jika masjid dijadikan sebagai sasaran utama kelompok-kelompok salafi tentu tidak mengherankan karena inilah jantung peradaban Islam. Dalam sejarah Islam, masjid selalu menjadi pusat aktivitas masyarakat. Ia telah menjadi alat, sumber informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam mencapai kemajuan peradaban. Di manapun umat Islam berada, maka masjid pasti akan berdiri (Hodgson, 1999). Maka siapa saja yang berhasil menguasai masjid itu berarti mereka telah berhasil menguasai umat Islam. Menurut sebuah penelitian, masjid-masjid di perkotaan telah lama mengalami radikalisasi, yakni sejak tahun 1980-an yang penyebarannya dimulai dari aktivis masjid-masjid kampus. Setelah lulus kuliah, para aktivis ini menyebar dan bekerja di berbagai sektor swasta dan pemerintah, dan di sanalah mereka menguasai masjid-masjid untuk menyebarkan ajarannya (Alimi, 2018).

Riset-riset terdahulu yang dilakukan oleh berbagai lembaga lebih banyak memfokuskan diri pada fenomena kemunculan kelompok-kelompok Islam radikal pasca reformasi, seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, dan beberapa kelompok militan yang lebih kecil seperti Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Hizbullah dan Jundullah, dan lain-lain. Sebagian riset juga memfokuskan diri pada agenda kelompok-kelompok radikal seperti penegakan khilafah, pemberlakuan syariah secara formal dalam konstitusi negara, dan sejenisnya.

Riset yang dilakukan CSRC yang hasilnya tertuang dalam laporan ini lebih tertuju pada literasi keagamaan di masjid yang ditangani sepenuhnya oleh para takmir dengan dua mitra utamanya yaitu imam dan khatib/penceramah. Riset ini ingin melihat bagaimana praktik pengajaran keislaman dilakukan di masjid, metode apa yang digunakan, bagaimana para takmir mengelola para penceramah, bagaimana mereka mempersepsikan sejumlah isu terkait perdamaian, toleransi, dan anti-kekerasan; serta bagaimana cara mereka melibatkan kaum muda. Sejumlah tema terkait kebangsaan juga ditanyakan kepada para

takmir, semisal kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, persepsi mengenai NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta pandangan tentang khilafah Islamiyah. Riset juga dilengkapi dengan pandangan, kesan, testimoni dari para jamaah masjid yang dijadikan sampel penelitian.

Fokus Kajian

Penelitian ini berfokus pada literasi keagamaan di masjid-masjid di tujuh kota, yakni: Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Garut-Tasikmalaya, Manado, Ambon, dan Mataram. Secara tradisional, literasi keagamaan dapat dipahami sebagai kemampuan baca tulis (melek baca) literatur keagamaan. Pemahaman literasi keagamaan itu kini diperluas menjadi segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan keagamaan. Dan yang dimaksud “pengetahuan keagamaan” di sini memiliki makna yang luas, yakni pengetahuan tentang agama tertentu dan atau agama-agama dari segi ajaran normatifnya maupun konteks keagamaan yang kompleks dari segi sosiologis, politik, sejarah dan budayanya. Namun, untuk tujuan kajian ini, literasi keagamaan dibatasi hanya pada literasi keagamaan Islam mencakup praktik pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh para takmir masjid dengan mitra-mitra utama mereka, yaitu imam, khatib/penceramah, dan jamaah. Pertanyaannya: mengapa masjid?

Masjid memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Islam *rahmatan lil-'alamin*. Bahkan dapat dikatakan masjid menjadi lokus sentral dalam mendiseminasikan ide-ide toleransi, perdamaian, dan anti-kekerasan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri juga bahwa narasi-narasi intoleran dan bernuansa kekerasan tak jarang disuarakan di dalam masjid baik lewat ceramah maupun khutbah. Karena itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana posisi dan peran masjid saat ini dalam meningkatkan literasi keagamaan. Apakah ide-ide toleransi dan perdamaian sebagai bagian integral dari Islam *rahmatan lil-'alamin* tersampaikan di masjid, ataukah justru sebaliknya dimana khatib atau penceramah menggunakan masjid untuk menyampaikan narasi-narasi intoleransi, kekerasan, dan tidak mendukung nilai-nilai perdamaian.

Tindak lanjut dari kegiatan *need assessment*, sarasehan, dan penelitian ialah kegiatan berupa pelatihan yang melibatkan para takmir masjid, khatib, dan imam. Dalam kegiatan pelatihan, beberapa aspek literasi keagamaan yang ditekankan ialah dakwah Islam *rahmatan lil-'alamin*,

Islam sebagai agama perdamaian (*dien al-salaam*), prinsip musyawarah dalam demokrasi, pengamalan *amar ma'ruf nahi munkar*, strategi dakwah kaum muda muslim milenial, dan khutbah persuasif. Itulah yang dimaksud dalam kajian ini sebagai literasi keagamaan.

Literasi keagamaan dengan aspek-aspek tersebut dirancang untuk memperkuat argumentasi Islam sebagai agama perdamaian. Tema besar Islam *rahmatan lil-'alamin* tidak selalu mudah dipahami, apalagi diimplementasikan. Maka dalam program ini ditekankan betapa pentingnya para takmir masjid, khatib, dan imam, memiliki kemampuan menafsirkan doktrin-doktrin keagamaan yang berkaitan dengan situasi kemasyarakatan, termasuk dalam kaitannya dengan politik sehingga *jamaah* (masyarakat) memiliki pegangan untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan Islam *rahmatan lil-'alamin* tersebut.

Akhir-akhir ini muncul fenomena yang disebut “ustadz google”, yakni para mubaligh yang secara tiba-tiba meroket dan menjadi panutan umat, padahal mereka hanya belajar agama melalui internet. Mereka tidak memiliki latar belakang keagamaan yang mendalam dan memadai seperti pesantren, namun kata-kata mereka diikuti oleh kaum muda generasi milenial karena mereka merupakan –pada umumnya– selebriti atau mantan selebriti yang “berhijrah” dan tokoh publik (*public figure*). Pemahaman keagamaan yang verbalistik, kaku (*harfiah*), dan cenderung keras menjadi gejala umum dari para ustadz google ini. Tren keagamaan yang lahir dari fenomena semacam ini, yang paling populer, ialah apa yang disebut “hijrah” –secara umum dipahami sebagai menjadi lebih islami dengan membuat batas yang tegas dari lingkungan yang tidak islami. Inilah yang menjelaskan munculnya fenomena hijab *syar'i* (bahkan cadar), celana cingkrang, janggut, dan sebagainya.

Sungguhpun yang tampak di permukaan adalah para ustadz selebriti yang mendorong gerakan syariatisasi, senyatanya fenomena semacam ini menjadi agenda kelompok-kelompok Islamis yang memang sejak lama menginginkan penerapan syariat Islam secara total (*kaffah*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalahnya adalah, agenda semacam ini berbenturan dengan realitas masyarakat yang majemuk. Pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam oleh kaum Muslim berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan sesuai dengan yang mereka inginkan. Apalagi isu syariat ini dibawa ke ranah

yang lebih luas seperti negara, niscaya akan menimbulkan benturan yang lebih keras. Sebab kaum Muslim Indonesia telah sepakat menerima Indonesia sebagai Negara Pancasila, bukan Negara Syariah, dan NKRI bukan NKRI Bersyariah ataupun Khilafah.

Kaum muda menjadi sasaran dari kelompok-kelompok Islamis karena mereka adalah “kawah candradimuka”; keberhasilan mereka menggarap kaum muda milenial dengan sendirinya menjadi kemenangan masa depan bagi tegaknya syariah di tingkat masyarakat, bangsa, dan negara. Persoalan utama dari kelompok-kelompok Islamis ini ialah menafikan keragaman tafsir dan artikulasi agama. Padahal itulah yang menjadi karakteristik kaum Muslim Indonesia.

Doktrin “*amar ma’ruf nahi munkar*” termasuk salah satu doktrin yang menjadi pintu masuk kelompok Islamis untuk menyasar generasi milenial. Dengan memanfaatkan psikologi yang rentan dari para remaja, doktrin *amar ma’ruf nahi munkar* kerap kali dirancang untuk mengkader generasi milenial menjadi radikal. Sebab hanya dengan cara meradikalisasi generasi milenial, kelompok *amar ma’ruf nahi munkar* ini punya masa depan.

Maka penting sekali para takmir masjid, khatib, imam, memahami kebutuhan jamaah generasi milenial. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam pelukan kelompok Islamis, atau kelompok *amar ma’ruf nahi munkar* yang cenderung keras, atau bahkan belajar dari “ustadz google” karena riwayat keilmuannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sumber literasi keagamaan yang sesungguhnya ada di masjid. Maka para takmir, khatib, dan imam, perlu dibekali atau membekali diri dengan pemahaman yang memadai mengenai Islam *rahmatan lil-’alamin*.

Kaum muda merupakan kelompok yang rentan terpapar narasi ekstremisme. Dalam program ini para takmir, khatib, dan imam, dibekali pemahaman bagaimana mengenali narasi ekstremis tersebut. Maka selain membekali materi dakwah Islam *rahmatan lil-’alamin* dan metode khutbah persuasif, program ini membekali kelompok sasaran untuk memahami bagaimana mengamalkan *amar ma’ruf nahi munkar* dalam kehidupan sehari-hari. Sebab doktrin *amar ma’ruf nahi munkar* inilah yang sering disalahpahami, bahkan disalahgunakan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *Interpretative Phenomenology Analysis/IPA* (Roller, 2015; Smith et al., 2019). Dengan pendekatan ini penelitian bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengeksplorasi bagaimana narasumber memaknai isu-isu yang ditanyakan dalam penelitian. CSRC sebagai pelaksana program Convey dan PPIM mengemas kegiatan ini berada dalam satu paket yang dilakukan di masjid-masjid di tujuh kota, yakni: Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Garut-Tasikmalaya, Manado, Ambon, dan Mataram. Kegiatan yang dimaksud meliputi: sarasehan, pelatihan, dan penelitian.

Narasumber dalam penelitian adalah para takmir, khatib, dan imam. Untuk mengkonfirmasi hasil wawancara dengan takmir, para peneliti juga mewawancarai para jamaah dari lingkungan masjid bersangkutan. Narasumber dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel disengaja (*intensity purposed sampling*). Teknik ini bertujuan memilih sampel penelitian sedemikian rupa agar dapat mencerminkan karakteristik kelompok sasaran sehingga memudahkan untuk melakukan analisis perbandingan pandangan, perilaku, dan sikap mereka terhadap isu yang sedang diteliti. Di samping itu, porsi yang kecil dari narasumber juga dipilih dari kalangan yang disebut *significant others*, yaitu mereka yang dinilai berpengaruh terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*) masjid, yakni para jamaah. Di antara mereka adalah: ketua/wakil ketua takmir, khatib atau penceramah yang berpengaruh, tokoh agama, aktivis masjid dari kalangan tokoh agama, dan kaum muda (khususnya aktivis organisasi remaja masjid).

Penelitian berlangsung antara Juli – Agustus 2018, dengan total narasumber sebanyak: 109 orang dengan rincian sbb: Ambon (14 narasumber), Banda Aceh (16 narasumber), Garut-Tasikmalaya (15 narasumber), Jakarta (16 narasumber), Manado (17 narasumber), Mataram (13 narasumber), dan Palembang (18 narasumber). Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wacana seputar toleransi, perdamaian, dan anti-kekerasan menjadi isu yang penting untuk diperhatikan di daerah-daerah tersebut mengingat daerah-daerah tersebut merupakan *hot spot* berdasarkan riset-riset sebelumnya

(Jakarta), habitat kelompok minoritas yang kerap menjadi sasaran kekerasan, seperti Syiah dan Ahmadiyah (Mataram, Garut-Tasikmalaya), daerah bekas konflik horizontal (Ambon), konflik vertikal (Aceh), tempat perjumpaan mayoritas Kristen dan minoritas Islam dalam satu atap (Manado), dan daerah netral sebagai pembanding (Palembang).

Laporan yang disajikan ini merupakan hasil analisis data secara global. Namun selain itu, penelitian ini juga menyediakan laporan per daerah yang disusun oleh masing-masing peneliti. Laporan global ini disusun dari temuan-temuan penting dalam laporan daerah dan masukan lain dari kegiatan sarasehan hasil penelitian di wilayah masing-masing.

Hasil-hasil penelitian *needs assessment* ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan di tujuh kota yang menjadi area penelitian. Tujuan dari pelatihan tersebut ialah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan takmir masjid, imam, dan khatib tentang literasi keagamaan yang damai, moderat, toleran, anti kekerasan, dan bernuansa milenial. Melatih dan membekali keterampilan takmir masjid, imam, dan khatib tentang materi dan teknik-teknik fasilitasi literasi keagamaan dengan pendekatan partisipatoris. Mendiskusikan isu aktual tentang literasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan di masjid dan lingkungan sekitar. Rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:

- Ambon: 3-5 Desember 2018, di The City Hotel, Ambon, Provinsi Maluku.
- Banda Aceh: 6-8 November 2018, di Hotel Sulthan Internasional, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh.
- Jakarta: 12-14 November 2018, di Hotel Zia Agria, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Manado: 21-23 November 2018, di Hotel JLE'S Boutique, Kota Manado, Sulawesi Utara.
- Mataram: 11-13 Desember 2018, di Hotel Golden Palace, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Palembang: 23-25 Oktober 2018, di Hotel Zuri Express, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
- Garut-Tasikmalaya: 26-28 November 2018, di Hotel Fave, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Selain penelitian needs assessment pelatihan, CSRC juga melakukan kegiatan sarasehan. Sarasehan merupakan sebuah forum untuk mengkomunikasikan atau memaparkan hasil-hasil pelatihan, yaitu hasil identifikasi dan pemetaan terhadap persoalan, analisis terhadapnya dan rumusan solusi atau resolusi pemecahannya. Hasil pemaparan ini diharapkan mendapat respon dan pengalaman berbeda dari peserta sarasehan untuk lebih memperkaya hasil-hasil pelatihan.

Kegiatan sarasehan juga dilakukan di tujuh kota yang menjadi area penelitian dan pelatihan. Sarasehan mengambil tema: Literasi Keagamaan dan Problem Sosial Kemasyarakatan di Masjid dan Lingkungan Sekitar. Waktu dan tempat pelaksanaannya sbb:

- Ambon: 17 Desember 2018, di Aula Senat IAIN Ambon, Gedung Rektorat Lantai 2 IAIN Ambon. Dengan narasumber: Erwin Notanubun, M.H dan La Januri. Moderator: Zet. A. Sandia, M.Si.
- Banda Aceh: 8 Desember 2018, di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. dengan narasumber: Fuad Al-Burhani, M.A dan Hayatun Nufus. Moderator: Chairul Husni.
- Garut-Tasikmalaya: 5 Desember 2018, di STID Sirnarasa, Ciamis, Jawa Barat. Dengan narasumber: Ustadz Nanang Syarif Hidayatulloh dan Ustadzah Rosse Puji Lestari.
- Manado: 1 Desember 2018, di Masjid Al-Fatah IAIN Manado, Sulawesi Utara. Dengan narasumber: Zhufair Lintuhaseng dan Nurul Rizkillah Pomalingo.
- Palembang: 4 November 2018, di Aula Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Fatah Palembang. Narasumber: Mirasuddin, SH dan Wenni Evasari.
- Jakarta: 9 Desember 2018, di Masjid Nurul Falah, Komplek Pertamina Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dengan narasumber: Hasan Shobary, MA dan Muawwanah.
- Mataram: 22 Desember 2018, di Gedung Galery Taman Budaya NTB. Dengan narasumber: Ust. H. Ahmad Taufik Azhar dan Muhammad Afzal, MA.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan untuk membuat narasi tertulis yang dituangkan dalam laporan ini.

C. LITERASI KEAGAMAAN MASJID DITUJUH KOTA

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa literasi keagamaan di masjid-masjid masih bercorak konvensional, yaitu dalam media pengajian, khutbah, dan ceramah. Kecuali sedikit saja, kegiatan yang berbobot akademik semisal seminar atau diskusi tentang sebuah pemikiran sulit ditemukan. Begitu pula muatannya yang secara garis besar mengarah ke pengajaran fikih dan akidah dalam arti konvensional. Yakni, untuk kebutuhan praktik ibadah sehari-hari dan peningkatan keimanan kepada Allah. Jarang sekali ditemukan literasi keagamaan yang secara khusus mengarah kepada syiar atau dakwah Islam *rahmatan lil-'alamin*, yang mempromosikan ide-ide perdamaian dan toleransi.

Berbagai kegiatan semisal khutbah, ceramah, dan pengajian, pada umumnya berjalan apa adanya. Dalam arti tidak dirancang secara khusus untuk mempromosikan Islam *rahmatan lil-'alamin*. Ide-ide seperti toleransi, perdamaian, dan anti-kekerasan sesekali muncul atas inisiatif pribadi para khatib atau penceramah. Namun apabila khatib atau penceramah yang mengisi acara tidak memiliki wawasan mengenai ide-ide tersebut maka ia bebas mengisi ceramahnya tanpa panduan. Dari celah inilah kerap muncul narasi-narasi intoleransi dengan artikulasi dan retorika yang berbeda-beda. Termasuk di dalam narasi ini ialah artikulasi politik yang keras baik yang ditujukan kepada pemerintah, kelompok Islam yang berbeda, maupun kelompok agama non-Islam.

Sebagai tempat berkumpulnya umat Islam, masjid memang terbuka dan fungsional untuk kegiatan apa saja. Dan tidak ada pula larangan dalam ajaran Islam untuk melakukan aktivitas bernuansa politik di dalam lingkungan masjid. Pemberdayaan dan penguatan kesadaran berdemokrasi atau pemenuhan dan penggunaan hak-hak kewargaan misalnya, kerap juga dilakukan di masjid. Namun jelas bahwa masjid tidak patut dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aksi-aksi agitasi, provokasi, mobilisasi massa (umat) untuk kepentingan politik praktis. Hal-hal semacam ini jelas kontra produktif dan tidak bisa dibenarkan karena akan memecah-belah umat Islam.

Literasi Keagamaan yang Dominan

Di masjid-masjid di tujuh kota yang diteliti, dimana para jamaahnya sangat beragam, para takmir merancang aneka kegiatan literasi

keagamaan yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ukhuwah Islamiyah di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya. Banyak program literasi yang dibuat untuk mencapai tujuan itu, dari mulai pengajian, ceramah, hingga pelatihan. Pengajian yang dimaksud tidak terbatas pada pelajaran membaca al-Quran, namun juga cara berwudu, cara salat yang benar, tata cara haji/umrah, berzakat, pelajaran akidah, dan akhlak. Menurut para takmir, masjid memang digunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang paling pokok saja dalam agama, di luar itu ada tempatnya sendiri. Tujuannya untuk meramaikan masjid.² Alasannya pun sederhana saja, yaitu bahwa orang datang ke masjid untuk ibadah, bukan untuk yang lain.³

Sementara itu program ceramah merupakan kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, dan acara-acara insidental seperti Maulid Nabi, Isra Mikraj, Nuzulul Quran, dan sebagainya. Kultum (kuliah tujuh menit) atau tausiyah sehabis shalat subuh atau maghrib, khutbah Jumat, dan pengajian mingguan atau bulanan dengan mengundang penceramah dari luar merupakan aktivitas rutin semua masjid. Materinya berkisar pada masalah akidah, ibadah, dan akhlak.⁴ Hampir semua masjid memiliki kecenderungan seperti ini, sehingga sudah menjadi semacam tradisi yang tumbuh dalam literasi keagamaan dan sekaligus menjadi kesadaran kolektif umat Islam. Maka baik penceramah maupun jamaah seakan sudah terikat oleh kesadaran kolektif tersebut. “Para penceramah sudah tahu kebutuhan jamaah, mereka menyampaikan hal-hal yang simpel saja yang sering terlupakan seperti soal ibadah. Jadi tidak mengangkat masalah yang berat-berat,” ujar Rizaldi Pedju, seorang dosen dan penceramah masjid kampus IAIN Manado.⁵

Sedangkan program pelatihan biasanya diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) di wilayah masing-masing.

² Wawancara dengan Didin Baharuddin, Khatib Masjid Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, 16 Juli 2018.

³ Wawancara dengan Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd, Ketua Yayasan Masjid al-Jihad, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 13 Juli 2018.

⁴ Sebagai contoh: para jamaah dari kalangan remaja yang diwawancarai di Garut-Tasikmalaya. Semuanya mengatakan bahwa materi yang selalu mereka dengar dalam ceramah atau khutbah memang hanya masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Lihat Mohamad Nabil, “Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya”, Agustus 2018.

⁵ Wawancara dengan Rizaldi Pedju, 13 Juli 2018.

Materinya sendiri bervariasi dari soal manajemen masjid, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) takmir, kebersihan masjid, hingga pengelolaan wakaf dan zakat *mal* oleh masjid.

Literasi keagamaan yang berkaitan dengan masalah *hablun minannas* (hubungan horizontal sesama manusia) lebih banyak didominasi oleh tema *ukhuwah islamiyah*, dan sedikit yang terkait dengan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan). Pada beberapa masjid, tema-tema kebangsaan seperti soal NKRI, Pancasila, Kebhinnekaan, kerap disampaikan melalui kegiatan ceramah, tapi tidak menjadi silabus resmi. Begitu juga tema-tema hubungan antaragama seperti pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan anti-kekerasan, hanya menjadi tema-tema yang lepas. Dalam arti, diserahkan kepada kreativitas para penceramah, baik penceramah dari dalam (takmir masjid) maupun yang didatangkan dari luar.

Minimnya penyampaian materi atau tema-tema seperti di atas (kebangsaan dan hubungan antaragama) oleh para penceramah tidak lantas menunjukkan bahwa masjid bersangkutan berkecenderungan radikal. Dalam kenyataannya, semua takmir masjid yang diwawancarai di tujuh kota menolak ide-ide radikalisme, dan mendukung wacana kebangsaan, kebhinnekaan, dan toleransi antaragama. Jadi, walaupun wacana-wacana tersebut tidak tersampaikan secara terencana, para takmir setidaknya berusaha agar para penceramah tidak menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan wacana di atas. Caranya ialah melakukan *briefing* dan atau seleksi terhadap para penceramah yang akan diundang.

Literasi keagamaan di masjid-masjid tampaknya tidak menjadi perhatian khusus dari kantor Kementerian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia. Maka turunan ke bawahnya pun, di jajaran takmir masjid, manajemen literasi keagamaan berjalan secara tradisional atau apa adanya. Kegiatan rutin seperti pengajian, khutbah jumat, ceramah pada peringatan hari-hari besar Islam menjadi menu literasi keagamaan yang umum di semua masjid. Beberapa masjid, terutama yang masuk kategori masjid besar (masjid raya atau masjid jami), memiliki sekolah (biasanya tingkat PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini atau TPA/Taman Pendidikan Al-Quran), kursus keagamaan seperti tajwid dan iqra, pelatihan pengurusan jenazah, dan sejenisnya. Tapi itu tentu masih jauh dari harapan tentang literasi keagamaan yang

representatif. Sebagian masjid juga memiliki ruang khusus yang disewakan untuk resepsi pernikahan yang cukup luas, namun pada saat bersamaan tidak ada ruang perpustakaan yang berhubungan langsung dengan literasi keagamaan (lihat pemaparan di bawah).

Masjid-masjid di Jakarta kerap menerima pasokan materi dari luar sebagai bahan untuk ceramah atau khutbah. Sebagai misal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerbitkan buku tentang bahaya terorisme yang dibagikan ke setiap masjid. “Takmir masjid mau menggunakan buku itu atau tidak ya terserah, kami hanya menghimbau saja agar buku itu digunakan oleh para khatib,” Ujar Naif Adnan, Penyuluh Bimas Islam Kementerian Agama Jakarta Selatan.⁶ Buku-buku panduan tentang bahaya AIDS, narkoba, dan sejenisnya, juga kerap disebar melalui masjid-masjid. Namun takmir masjid tidak mengharuskan penceramah untuk menyampaikan materi tersebut. Mereka hanya membagikan buku-buku tersebut kepada penceramah.

Ketersediaan materi literasi dalam bentuk buku sangat minim, karena rata-rata masjid yang diteliti tidak memiliki perpustakaan. Kalaupun rak-rak buku di masjid dapat disebut perpustakaan maka itu pun hanya diisi oleh kitab al-Quran, materi surat Yasin, dan lembaran buletin dakwah yang biasa disebar di masjid-masjid saat salat Jumat. Menurut Ustadz Dr. Firdaus Basuni, M.Pd, Ketua Yayasan Masjid al-Jihad, Palembang, jarang sekali orang datang ke masjid untuk membaca. Di masjid al-Jihad saja yang jamaahnya banyak dari kalangan mahasiswa, ujanya, tidak pernah ada yang menanyakan perpustakaan.⁷ Alternatif dari perpustakaan formal ialah “perpustakaan berjalan”, yakni para ustadz atau penceramah itu sendiri. Mereka mengisi pengajian berdasarkan kitab-kitab yang mereka pilih dan bawa sendiri.⁸

Tentu saja setiap masjid ingin memiliki perpustakaan, namun pada umumnya terbentur biaya pembangunan serta materi buku-bukunya. “Sebenarnya dari dulu kami ingin sekali punya perpustakaan, tapi sampai sekarang belum terwujud. Ada lemari di sana itu tapi isinya masih al-Quran saja dan beberapa buku bacaan,” ungkap Hadi Purwanto, Takmir Masjid Darun Naim, Ambon, Maluku.⁹

⁶ Wawancara dengan Naif Adnan, 16 Juli 2018.

⁷ Wawancara dengan Dr. H. Firdaus Basuni, M.Pd, 13 Juli 2018.

⁸ Wawancara dengan Ustadz H. Darlan, 14 Juli 2018.

⁹ Wawancara dengan Ustadz Hadi Purwanto, 14 Juli 2018.

Masjid-masjid di Jakarta pun tidak semua memiliki perpustakaan. Dan walaupun ada isinya masih sangat terbatas. Tak terkecuali kasus ini pun terjadi pada masjid besar seperti Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Menurut pengelolanya, masjid yang terletak di kawasan elit Menteng ini dulu pernah memiliki perpustakaan namun saat Jakarta ditimpa banjir besar semua bukunya habis.¹⁰ Yang menarik justru Masjid Al Hidayah di Jakarta Selatan. Walaupun masjid al-Hidayah dikelola oleh Mal Gandaria City, di sini terdapat perpustakaan dengan koleksi bahan bacaan yang cukup banyak. Takmir masjid ini menjelaskan bahwa koleksi buku-buku di sini pada mulanya dibeli sendiri dari uang kas masjid. Dalam perkembangannya kemudian banyak mendapat sumbangan dari jamaah. Perpustakaan yang dibangun pada tahun 2014 ini menghimpun beragam buku, di antaranya: Kitab terjemah Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, terjemah Kitab Fathul Bari karya Ibu Hajar Al-Asqolani, satu set kitab Al Umm karya Imam Syafii, satu set Tafsi Jalalain karya Imam Jalaludin Asyuyuti, dan buku-buku umum lainnya seperti buku “Qurasih Shihab Menjawab” dan buku “Islam Syariat” karya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nasir.¹¹

Narasumber Literasi Keagamaan

Seperti halnya kebijakan literasi keagamaan yang pada umumnya “seragam” dengan sedikit variasi kegiatan di sana-sini, begitu pula dalam hal narasumber penceramah. Masjid-masjid di tujuh kota yang diteliti umumnya memiliki tradisi yang sama yakni mengundang atau mendatangkan narasumber (khatib/penceramah) dari luar, baik untuk kegiatan rutin seperti khutbah Jumat maupun untuk mengisi acara-acara insidental seperti Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mikraj. Pola perekrutmennya pun cenderung sama yakni, membawanya ke dalam rapat pengurus dan membicarakan dengan dewan penasihat masjid untuk meminta persetujuan. Setelah disepakati oleh rapat barulah surat undangan dikirimkan atau diantar kepada narasumber bersangkutan.

Pada praktiknya, rapat-rapat dan konsultasi semacam itu bukan hanya untuk mencari penceramah yang cocok, tapi juga untuk menghindari penceramah yang tidak cocok. Forum rapat atau dewan penasihat bisa

¹⁰ Wawancara dengan KH. Mulyadi, Takmir Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, 19 Juli 2018.

¹¹ Wawancara dengan Faizin Mazdi, Takmir Masjid Al Hidayah Mall Gandaria City, Jakarta, 18 Juli 2018.

saja mencoret nama yang diusulkan dan menggantinya dengan nama lain berdasarkan sejumlah pertimbangan. Hal semacam itu sudah biasa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penceramah/khatib yang diundang ternyata tidak memiliki kompetensi keilmuan (agama). Atau, penceramah/khatib yang diundang potensial menimbulkan masalah mengingat rekam jejaknya, misalnya memiliki kecenderungan radikal atau berafiliasi dengan organisasi radikal.

Tentu saja ada pengecualian. Di Jakarta ada masjid yang tidak menerapkan seleksi ketat bagi calon-calon penceramah. Penceramah dengan ragam karakter dan gaya serta latar belakang organisasi keagamaan, bisa mengisi kegiatan di masjid ini, termasuk mereka yang berkecenderungan “keras” dalam politik, saat mengkritik pemerintah, atau saat mengangkat isu-isu di dunia Islam seperti Palestina, Rohingnya, Uighur (China), dan lain-lain. Takmir masjid tipe ini meyakini bahwa masjid dibuat untuk mencerdaskan umat, termasuk dalam hal politik. Karena itu penceramah yang mau berbicara politik tidak perlu dicegah. Jamaah atau umatlah yang akan menyeleksi, apakah mereka mau menerima atau menolak seorang penceramah. Pihak takmir hanya mengevaluasi dalam suatu rapat berdasarkan masukan dari jamaah. “Jadi kami, takmir masjid, tidak perlu sampai harus mengecek *curriculum vitae* para penceramah. Itu pengerdilan,” tegas Dr. Usman Shofi, Kepala Takmir Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, mewakili pandangan ini.¹²

Menurut Usman Shofi, ia tidak alergi dengan politik, termasuk politik di masjid. Alasannya, Rasulullah sendiri mengajarkan politik di masjid. “Silakan aja, selama masih dalam koridor sewajarnya, artinya tidak membodohi, tidak provokasi, tidak menjatuhkan, dan tidak membuat kekerasan, apalagi mengajari orang untuk melakukan pengeboman.” Ia menambahkan.

Sekali lagi bahwa pandangan ini tidak *mainstream*. Hasil penelitian di tujuh kota memperlihatkan bahwa para takmir cenderung hati-hati dalam soal ini. Materi-materi yang disampaikan lebih ke soal-soal ibadah, keimanan, dan ketakwaan. Bahkan untuk mengangkat isu-isu aktual saja, menurut ustadz Ibrahim, khatib dan imam Masjid Raya

¹² Wawancara dengan Dr. Usman Shofi, 13 Juli 2018.

Taqwa, Palembang, juga cenderung dihindari karena jamaah menganggap masalah itu akan dibawa ke politik.¹³ Pandangan serupa dikemukakan oleh Taufiq Hidayat, Takmir Masjid Asyuhada Universitas Trisakti Grogol, Jakarta. “Janganlah bicara politik di dalam masjid, sebab nanti jamaahnya akan terpecah belah.”¹⁴ Hal yang senada muncul dari pernyataan Dede Muis, Khatib Masjid Almuttaqin Tasikmalaya, Jawa Barat, “Ketika ada seorang khatib yang mengangkat suatu masalah yang sedang menjadi isu di masyarakat seperti masalah politik, ekonomi, dan semacamnya, justru dicemooh dan jadi ejekan karena dinilai tidak penting untuk dibicarakan di masjid.”¹⁵

Bagi sebagian besar takmir masjid, yang penting untuk disampaikan di masjid ialah soal-soal keimanan jamaah dan peningkatan ukhuwah Islamiyah. Karena untuk masalah itu semua umat Islam sepakat. Sedangkan masalah-masalah yang sensitif harus dihindari. Untuk itu tidak jarang para takmir merasa perlu memberi arahan kepada penceramah/khatib dari luar. “Para penceramah atau khatib tidak boleh membahas suatu madzhab tertentu, tidak boleh berbicara politik, tidak boleh berbicara SARA. Fokus saja pada peningkatan kualitas iman para jamaah,” tegas Faizin Mazi, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Gandaria City, Jakarta, mewakili pandangan ini.¹⁶ Kolega Faizin di masjid yang sama, yakni Wahyudin, yang bertindak sebagai takmir sekaligus imam masjid, mengisahkan bahwa suatu ketika ada penceramah yang memprovokasi jamaah untuk tidak memilih salah satu calon presiden. Para takmir langsung menghentikan ceramahnya. Tidak sedikit juga penceramah yang dicoret dari daftar alias tidak pernah diundang lagi karena senang membid’ahkan atau mengkafirkan orang lain.¹⁷

Urusan politik juga menjadi perhatian serius di Manado. Dalam pandangan H. Rustam Ritjap, takmir dan imam Masjid Awwal Fathul Mubin, Manado, para penceramah bisa saja dari kalangan politisi. Nyatanya banyak muballigh yang aktif juga di partai politik seperti PAN, PKS, PPP, dan partai lainnya, atau menjadi wakil rakyat di parlemen. “Mereka boleh berceramah di masjid tapi jangan sekali-kali membawa

¹³ Wawancara dengan Ustadz Ibrahim, 15 Juli 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Taufiq Hidayat, 14 Juli 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Dede Muis, 15 Juli 2018.

¹⁶ Wawancara dengan Faizin Mazdi, 18 Juli 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Wahyudin, Takmir Masjid Al Hidayah Mall Gandaria City, Jakarta, 17 Juli 2018.

politik ke masjid atau mempolitisasi masjid,” tegasnya.¹⁸ Beberapa masjid di Manado bahkan menerapkan kebijakan yang cukup ketat dengan cara memeriksa naskah khutbah apabila penceramah berasal dari luar. Kebijakan ini ditempuh untuk menghindari benturan karena umat Islam dan Kristen di Manado sudah lama hidup berdampingan secara damai.

Peraturan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, juga sama ketatnya. Di sini sama sekali tidak diperbolehkan khatib atau penceramah menyinggung seseorang atau suatu golongan. Sebab tujuan syiar agama ialah membawa kesejukan, membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang benar, mengingatkan jamaah agar meningkatkan ibadah, dan hal-hal semacam itu. “Khatib yang membicarakan *khilafiyah* langsung kami coret. Penceramah yang membawa-bawa partai juga kami coret,” tandas KH Mulyadi, Sekretaris Takmir Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta.¹⁹ Bukan hanya itu, kegiatan yang dilakukan oleh RISK (Remaja Mesjid Sunda Kelapa) juga selalu dikawal oleh takmir. Mereka melihat apa jenis kegiatannya, karena dikhawatirkan akan menjerumuskan anak-anak remaja kepada sikap dan tindakan radikal, misalnya. Juga diperiksa siapa narasumbernya. Harus jelas rekam jejaknya, selain kapasitas keilmuannya.

Terdapat juga kecenderungan bahwa takmir masjid lebih memilih mengundang para penceramah yang sesuai dengan tradisi keislaman masjid yang bersangkutan. Misalnya, masjid dengan kecenderungan NU atau ala pesantren tradisional, maka akan mengundang penceramah dari kalangan mereka juga. Begitu juga masjid dengan kecenderungan Muhammadiyah, masjid dengan kecenderungan salafi, dan seterusnya. Menurut Mizaj Iskandar, seorang khatib di Masjid Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, kecenderungan-kecenderungan seperti itu cukup menonjol di Aceh.²⁰ Namun bukan berarti mereka tidak dapat berbaur. Dalam kenyataannya, kecenderungan itu baru tampak menonjol dalam acara internal organisasi mereka. Ketika ke luar, warna NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya tidak muncul, karena masyarakat tidak menyukai pemilahan-pemilahan semacam itu. Begitu seorang tokoh agama berdiri di

¹⁸ Wawancara dengan H. Rustam Ritjap, 12 Juli 2018.

¹⁹ Wawancara dengan KH. Mulyadi, 19 Juli 2018.

²⁰ Wawancara dengan Mizaj Iskandar, 13 Juli 2018.

hadapan umat Islam, maka ia mewakili semuanya, bukan hanya organisasinya.²¹

Hubungan Antaragama

Berbanding lurus dengan kenyataan bahwa isu-isu terkait toleransi dan perdamaian tidak menjadi bagian penting dari literasi keagamaan, begitu pula persoalan hubungan antaragama tidak mendapat perhatian yang memadai. Kecuali di Ambon, Maluku, yang pernah dilanda konflik bernuansa agama antara Muslim-Kristen, dan juga Manado, Sulawesi Utara, dimana umat Islam dan Kristen “hidup dalam satu atap” (baca: sangat dekat), di kota-kota lain masalah hubungan antaragama disederhanakan menjadi masalah “lakum dinukum waliyadin” alias masing-masing saja dan tidak saling mengganggu. Di daerah-daerah dimana muslim menjadi mayoritas multak seperti di Banda Aceh, Palembang, Mataram, Garut-Tasikmalaya, nyaris tidak ada program literasi terkait hubungan antaragama. Narasi terjauh dalam kasus ini adalah menjaga dakwah Islam agar tidak menyinggung agama lain dan keluar dari prinsip *bil hikmati wal mauizatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan* (dakwah dengan cara yang baik). Tugas para takmir disederhanakan, sekadar mengingatkan para khatib dan penceramah agar menjaga toleransi dalam beragama. “Prinsipnya jelas dalam al-Quran, yaitu *“lakum dinukum waliyadin”* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Itulah batas terakhirnya,” papar Muhammad Rafsanjani, takmir Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh.²²

Pandangan ini diamini oleh takmir-takmir lain di tujuh kota yang menjadi narasumber penelitian. Perbedaan hanya tampak pada masalah muamalat atau relasi dengan umat agama lain. Di Ambon dan Manado, misalnya, umat Islam dan Kristen sudah terbiasa berbaur satu sama lain termasuk kerjasama dalam acara-acara keagamaan, seperti acara buka puasa bersama di bulan Ramadhan yang tidak jarang melibatkan umat Kristen sebagai panitia. Begitu juga dalam acara perayaan Natal, umat Islam terutama para remajanya terlibat aktif dalam persiapannya. Hal semacam ini sudah menjadi semacam kesadaran umum di kalangan umat Islam, “Bahkan saya sendiri kerap diundang untuk memberikan ceramah di gereja,” ungkap Sartono

²¹ Nurchalis Sofyan, “Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Banda Aceh”, Agustus 2018.

²² Wawancara dengan Muhammad Rafsanjani, 14 Juli 2018.

Ahmad Assanusy, Khatib Masjid Darun Naim, Ambon.²³

Latar belakang dari munculnya kesadaran ini tidak sulit ditelusuri. Di Ambon pernah pecah konflik antara Muslim-Kristiani (1999-2003) yang terbilang cukup parah dan meninggalkan trauma bagi kedua pihak. Walhasil, sekarang mereka memikul tanggung jawab bersama untuk memulihkan hubungan tersebut agar konflik serupa tidak terulang lagi, dan tidak mewariskan dendam kepada generasi muda. Berbagai momen yang dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan kedua belah pihak mereka ambil untuk tujuan menciptakan perdamaian. Acara buka puasa bersama, Idul Fitri, dan Natal, adalah beberapa di antaranya, selain acara-acara seni-budaya seperti pentas musik, dan lain-lain.

Hal yang sama juga terjadi di Manado dimana Muslim sebagai minoritas hidup berdampingan dengan umat Kristiani, bahkan bercampur baur dalam keseharian mereka. Acara Idul Fitri dan Natalan menjadi momen yang dinikmati bersama-sama tanpa ada yang mempermasalahkan secara serius dari sisi akidah. Tokoh-tokoh agama baik Muslim maupun Kristen menyadari benar bahwa konflik agama seperti yang pernah terjadi di Ambon bisa saja terjadi di Manado apabila mereka tidak berupaya memupuk toleransi dan menjaga kebersamaan.

Riak-riak tentu ada. Isu kristenisasi kerap menjadi perbincangan publik, terbuka atau diam-diam. Perpecahan dalam lingkup gereja besar menjadi berbagai denominasi berakibat pada berkurangnya jemaat gereja besar. Ini menjadi alasan bagi gereja untuk mencari jemaat baru ke penduduk muslim. Masalah ini dikemukakan oleh dr. Taufiq, seorang penceramah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang juga seorang penceramah dari Muhammadiyah, 12 Juli 2018:

“Salah satu cara kristenisasi di sini melalui kawin-mawin, menghamili perempuan muslimah. Juga politik makanan dimana terjadi pengusiran elegan melalui dominasi kuliner non halal, menyingkirkan kuliner muslim. Lihat juga bangkitnya organisasi adat sebagai cara untuk mengkonter Islam melalui gerakan budaya, sebab kalau menggunakan simbol-simbol Kristen secara langsung akan berbahaya dan mendapat penolakan. Mereka tidak ingin *head to head* dengan Islam. Sejumlah tokoh sudah

²³ Wawancara dengan Sartono Ahmad Assanusy, 15 Juli 2018.

menyadari hal ini dan dilakukan dialog. Tapi secara umum selama ini kita baik-baik saja.”²⁴

Di kota-kota lain hubungan antaragama tidak seaktif di Ambon dan Manado karena memang Muslim merupakan kelompok mayoritas. Literasi keagamaan menyangkut hubungan dengan non-Muslim pun tidak terdengar. Walaupun ditelusuri paling banter kita akan menemukan jejak literasi yang bersifat normatif tentang bagaimana sikap umat Islam terhadap umat agama lain. Dalam ceramah-ceramah yang ditekankan ialah larangan mencampuri agama orang lain. “Semua sudah diatur dalam al-Quran, yaitu ‘lakum dinukum waliyadin’ (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Begitu saja sudah cukup,” jelas Dr. Nuruddin, Imam Masjid Al-Jihad, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi, tambahnya, kehidupan yang rukun dan damai itu akan tercipta kalau kita tidak saling mengusik.²⁵

Pernah terjadi kasus di sebuah masjid di Palembang, seorang penceramah menyinggung umat agama lain, dan itu terdengar sampai keluar karena ceramah tersebut disiarkan melalui pengeras suara. Seorang yang beragama Kristen mendengar itu dan melaporkannya ke pihak masjid. Dengan sigap para takmir masjid mengambil tindakan. Maka sejak itu hanya azan saja yang boleh disiarkan ke luar melalui pengeras suara, sedangkan untuk acara-acara lain seperti ceramah hanya diperdengarkan di dalam. Tidak disiarkan melalui pengeras suara.²⁶ Bagi H. Ghaib Amin, Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, Manado, Sulawesi Utara, larangan menyinggung agama lain menjadi pegangan yang baku untuk setiap penceramah yang diundang ke masjid ini. Bukannya tidak boleh mengatakan bahwa hanya agama kita yang benar, ujanya, tapi harus dibatasi sampai di situ. Tidak boleh dilanjutkan bahwa “agama lain salah”. Karena itu sudah menyinggung orang lain dan mencampuri keyakinan agama lain. “Agama Islam benar untuk orang Islam; agama lain benar untuk yang lain, begitu saja,” tegasnya.²⁷

Syiah dan Ahmadiyah

Keberadaan jamaah Syiah dan Ahmadiyah tetap menjadi kontroversi. Pasalnya, dua aliran ini dipandang oleh kaum Muslim (Sunni) sudah

²⁴ Wawancara dengan dr. Taufiq, Tokoh Muhammadiyah Manado, 12 Juli 2018

²⁵ Wawancara dengan Dr. Nuruddin, 14 Juli 2018.

²⁶ Wawancara dengan Imron Rosyidi, Takmir Masjid Nurul Ikhwan PLN, Palembang, Sumatera Selatan 13 Juli 2018.

²⁷ Wawancara dengan H. Ghaib Amin, 11 Juli 2018.

bukan lagi masalah *furu'iyah* (atau masalah cabang) dari agama melainkan menyangkut masalah akidah yang sangat prinsip. Dalam Islam, perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* dapat ditolerir, bahkan terbuka ruang lingkup *ijtihad* yang sangat luas, dimana para ulama dapat berbeda pendapat. Para takmir berpandangan jika masalah *furu'iyah* tidak menjadi hambatan untuk persatuan umat Islam, asalkan tidak dibesar-besarkan. Perbedaan mazhab pun dianggap sebagai pilihan-pilihan yang memperkaya wacana dan tradisi keilmuan dalam Islam. Namun Syiah dan Ahmadiyah dipandang sebagai kasus yang berbeda. Walaupun begitu tetap ada variasi pandangan dari yang sangat antipati hingga yang moderat, khususnya dalam kasus Syiah. Sedangkan untuk kasus Ahmadiyah hampir serempak memandangnya sebagai aliran yang menyimpang dari Islam.

Ustadz Abda, Khatib dan Imam Masjid as-Salam Garut, Jawa Barat, menjelaskan, “Kalau menyangkut akidah mau tidak mau kita harus berbeda. Nah, Ahmadiyah dan Syiah itu sudah menyangkut akidah, dan itu harus dibesar-besarkan untuk menyelamatkan umat Islam. Sebab kalau kita diam terhadap Syiah dan Ahmadiyah, berarti kita diam di atas kemungkaran dan itu akan menjadi sebab turunnya azab. Orang yang tahu ada kemungkaran namun dia diam itu sama saja dia sebagai pelaku kemungkaran tersebut.”²⁸ Abda menambahkan bahwa kaum Muslim Sunni tidak akan mau bersatu dengan Syiah dan Ahmadiyah karena problem pada keduanya bukan soal *furu'* melainkan soal *ushul* atau prinsip/pokok. Kalau masalah *ushul*-nya yang menjadi pokok sudah berbeda, ujarnya, maka seluruh persoalan cabangnya juga akan berbeda.

Dengan pertimbangan tersebut maka di masjid-masjid di wilayah Garut-Tasikmalaya para penceramah kerap menyinggung soal Syiah dan Ahmadiyah ini. Terlebih lagi Jawa Barat secara umum merupakan daerah yang dikenal sebagai tempat berkembangnya Syiah dan Ahmadiyah. “Kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan umat Islam agar mewaspadaikan kedua aliran ini karena keduanya menyimpang dari Islam, setidaknya-tidaknya dari paham ahli sunnah wal jamaah,” tandas H. Ade Aceng, takmir Masjid Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Ustadz Abda, 12 Juli 2018.

²⁹ Wawancara dengan H. Ade Aceng, 15 Juli 2018.

Lebih jauh pandangan terhadap Syiah dan Ahmadiyah juga tidak terbatas menyangkut soal akidah melainkan juga praktik peribadatnya yang dianggap berbeda. Meskipun demikian, ketika dikonfirmasi lebih jauh soal kebenaran hal tersebut, rata-rata para takmir menyatakan tahu dari orang-orang yang sudah pernah menyaksikan cara peribadatan mereka, atau tahu dari informasi media massa. Isu tentang praktik ibadah yang berbeda, kitab suci yang berbeda (Ahmadiyah), dan secara umum bahaya Syiah dan Ahmadiyah lebih banyak didengar dari ceramah para ustadz daripada dibuktikan dengan mendatangi langsung untuk berdialog dengan jamaah kedua aliran tersebut. Bahkan di Nusa Tenggara Barat, salah satu basis bagi jamaah Ahmadiyah, sejumlah takmir masjid mengaku tidak peduli dan tidak mengurus soal tersebut. Namun demikian semua sepakat bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang dari Islam. Di Manado, menurut penuturan Habib Zed al Syawie, Imam Masjid Al-Masyhur Kelurahan Istiqlal, Kampung Arab, dulu daerahnya pernah dimasuki aliran Syiah dan Ahmadiyah namun mereka tidak bisa berkembang karena para takmir aktif memberikan pemahaman kepada jamaah tentang aliran-aliran yang menyimpang dari Islam.³⁰

Di kota-kota yang bukan merupakan habitat perkembangan jamaah Syiah dan atau Ahmadiyah dengan sendirinya kedua aliran tersebut tidak dianggap sebagai “isu”, dan karena itu nyaris tidak pernah menjadi topik khusus dalam literasi keagamaan. Walaupun begitu tetap dapat dikonfirmasi adanya kekhawatiran akan bahaya laten aliran Syiah dan Ahmadiyah. Maka sebuah benang merah dari pandangan para takmir dapat ditarik sebagai kesimpulan kasar bahwa bagi mereka masalah Syiah dan Ahmadiyah (beberapa takmir hanya menyebut Ahmadiyah, *minus* Syiah) sebenarnya tidak akan berlarut-larut seperti sekarang kalau saja mereka bersedia melepaskan diri dari Islam. Prinsip *lakum dinukum waliyadin* dalam hal ini tidak berlaku karena keduanya mengatasnamakan Islam, dan umat Islam merasa agamanya dicobak-cabik dengan pemahaman yang keliru.

Pandangan ini diwakili oleh Ustadz H.M. Irwan AW, Takmir Masjid Al-Jihad, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat:

³⁰ Wawancara dengan Habib Zed al Syawie, 12 Juli 2018.

Mohon maaf ya, Syiah dan Ahmadiyah itu tidak boleh kita bicarakan di masjid karena keduanya bagaikan kotoran; dilihat di sisi mana saja tidak ada bagusnya. Kalau dengan agama lain seperti Kristen dan Hindu, misalnya, kita tidak ada masalah, karena labelnya sudah lain. Tapi Syiah dan Ahmadiyah itu kan labelnya Islam tapi sesungguhnya jauh dari Islam. Kenapa tidak sekalian saja bikin agama baru, 'kan nabinya beda."³¹

Pandangan dari luar, atau bukan dari takmir masjid melainkan dari jamaah dapat juga dikemukakan di sini sebagai perbandingan. Pandangan ini khusus menyangkut aliran Syiah, dan berasal dari M. Ihwannas, jamaah Masjid Baitul Hikmah, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, "Tidak perlu ada ulama yg mengatakan Syiah itu salah atau benar, karena di Indonesia saja hidup ratusan ribu penganut Syiah, apalagi kalau ditambah dengan pengikut Syiah di seluruh dunia. Jumlahnya jutaan. Apakah mereka semuanya sesat?"³²

Sementara itu perbedaan dalam menyikapi Syiah dan Ahmadiyah tampak dari pandangan Imron Rosyidi, Ketua Takmir Masjid Nurul Ikhwan PLN Palembang dan sekaligus Ketua Dewan Masjid Kota Palembang. Menurut Imron, Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi yang melarang Ahmadiyah, dan dia adalah salah satu yang aktif menggalang gerakan anti-Ahmadiyah dan menuntut agar Ahmadiyah dilarang di Indonesia. Alasannya karena mengikuti fatwa MUI bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang menyimpang. Pandangan Imron berbeda dalam kasus Syiah. "Saya sering dituduh orang sebagai Syiah karena berteman dengan orang Syiah, seperti Jalaluddin Rakhmat. Saat akan dibuat Aliansi Nasional Anti Syiah saya diundang, saya tegaskan bahwa saya tidak setuju, karena saya tahu bahwa Syiah ada yang benar. Al-Qur'an mereka sama dengan kita, dan mereka juga berhaji ke Mekkah."³³

Hampir senada dengan Imron, koleganya di masjid yang sama yaitu Fathur Rahman, juga menolak Ahmadiyah namun bersikap lunak terhadap Syiah. Bagi Fathur, pengakuan terhadap Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi sudah menunjukkan kesesatan Ahmadiyah. Sedangkan Syiah tidak sejauh itu, melainkan sebuah perbedaan pemahaman yang

³¹ Wawancara dengan Ustadz H.M. Irwan AW, 18 Juli 2018.

³² Wawancara dengan M. Ihwannas, 18 Juli 2018.

³³ Wawancara dengan Ustadz Imron Rosyidi, 13 Juli 2018.

pada gilirannya memunculkan perbedaan keyakinan. Dan perbedaan semacam itu tidak mungkin dibendung atau dihentikan. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki kebijakan berdasarkan perundang-undangan. Itu hak negara. Tapi secara individu, menurut Fathur, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka sebagai golongan yang sesat atau mungkar.³⁴

Salafi, Islib, dan Isnus

Keberadaan aliran atau kaum Salafi tidak mencolok di beberapa masjid yang menjadi sampel penelitian. Beberapa masjid cukup terbiasa dengan kaum Salafi (biasanya dicirikan dengan memakai celana cingkrang dan berjanggut) sebagai jamaah. Namun sebagian takmir masjid bahkan tidak mengetahui keberadaan kaum Salafi di masjid mereka. Sebagian besar masjid yang diteliti hanya menampakkan kecenderungan preferensi NU dan Muhammadiyah (dan PERSIS serta PUI di Garut-Tasikmalaya), namun dalam interaksi mereka hampir-hampir tidak ada masalah. Sedangkan di kota besar seperti Jakarta, masjid-masjid semakin sulit diidentifikasi sebagai masjid NU atau Muhammadiyah.

Asumsi bahwa kaum Salafi biasanya mudah masuk ke masjid-masjid yang tidak memiliki identitas NU, Muhammadiyah, PERSIS, atau organisasi-organisasi massa Islam *mainstream* lainnya, tampaknya tidak didukung oleh bukti, setidaknya dari hasil penelitian ini. Bahkan di Masjid Raya Bintaro, Jakarta Selatan, yang dikenal cukup berani mengundang para penceramah yang keras seperti Ustadz Felix Siaw (tokoh Hizbut Tahrir Indonesia/HTI) dan Teungku Zulkarnaen, kaum Salafi ada namun tidak diberi tempat. “Kami sama sekali tidak dikuasai Salafi, memang dulu pernah terlihat ambisi golongan Salafi ingin menguasai masjid ini, tapi kita tolak. Mereka sekarang pindah, tapi sebagian rumahnya ada di sekitar sini,” jelas Dr. Usman Shofi, Takmir Masjid Raya Bintaro, Jakarta Selatan.³⁵ Keberatan Usman Shofi terhadap aliran Salafi karena menganggap bahwa fatwa dan pendapat mereka yang paling benar. Menurutnya, kita harus menghargai dan menghormati pendapat dari para ulama, sedangkan kaum Salafi berani mengatakan ulama tertentu sebagai kafir, bahkan sesat. Usman

³⁴ Wawancara dengan Fathur Rahman, akmir Masjid Nurul Ikhwan PLN, Palembang, Sumatera Selatan, 13 Juli 2018.

³⁵ Wawancara dengan Dr. Usman Shofi, 13 Juli 2018.

menjelaskan bahwa di Masjid Raya Bintaro banyak kaum Salafi, tapi sebagian mereka sudah menyesuaikan diri karena sudah memahami visi-misi masjid ini. Walhasil mereka sudah mulai terbuka.

Pandangan normatif seputar aliran Salafi juga muncul. Dalam konteks ini Salafi tidak melulu dilihat dari kacamata negatif. Seorang takmir masjid di Mataram justru mempertanyakan pemahaman masyarakat terhadap kelompok Salafi yang berkembang selama ini. “Kalau salafi dalam arti kata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah lalu diamalkan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi’in, lalu tabi’i tabi’in, dan dianut oleh mayoritas umat Islam sedunia, di mana salahnya. Bukankah “*waljamaah*” itu artinya mayoritas. Kalau Salafi lantas dikaitkan dengan Wahabi ya kita harus diskusi dulu benarkah seperti itu.”³⁶

Demikianlah asumsi tentang bahaya aliran Salafi tidak cukup merata di kalangan takmir. Begitu juga dalam kasus Islam Liberal atau Islib. Para takmir memiliki pandangan yang beragam menyikapi Islib. Sebagian menyatakan bahwa Islib tidak diperlukan karena terlalu memuja akal dan membahayakan akidah. Sebagian lagi masih melihat sisi positifnya sebagai dinamika pemikiran di kalangan Islam, khususnya kaum muda. Rentang pro-kontra di antara para takmir menyikapi Islib memang tidak terlalu jauh, bahkan semuanya cenderung ke arah penolakan. Namun, ada yang menolak dengan harga mati, sebagian lagi menolak dengan halus, atau dapat menerima dengan syarat tertentu.

Bagi Ustadz H.M. Irwan AW, Takmir Masjid Al-Jihad, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Islam liberal itu termasuk *gazwul fikri* (perang pemikiran) terhadap Islam, dan praktik penggunaan kebebasan berpikir yang melampaui batas. Dia juga menegaskan bahwa kalau kebebasan yang dimaksud dalam arti liberal itu bermakna boleh melanggar ranah-ranah yang sudah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Hadits, ijma’, qiyas dan sebagainya, maka Islam Liberal tidak perlu ada.³⁷ Bahkan ada yang menyamakan Islib dengan Syiah dan Ahmadiyah, maksudnya sama-sama menyimpang.³⁸

Argumen penyimpangan ini juga dipertegas oleh Imron Rosyidi, Takmir Masjid Nurul Ikhwan PLN Palembang, bahwa di dalam memahami

³⁶ Wawancara dengan Ustadz H.M. Irwan AW, Takmir Masjid Al-Jihad, Kota Mataram, NTB, 18 Juli 2018.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara dengan Jejen Jaelani, Takmir Masjid As-Syuhada Universitas Trisakti, Jakarta, 14 Juli 2018.

agama itu sudah ada dasar hukumnya, tidak bisa semaunya. Apalagi kelompok liberal memiliki anggapan bahwa al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman. Imron mengaku belum lama ini mendapat *postingan* di media sosial yang menyatakan bahwa orang-orang liberal itu dipelihara untuk mengadu domba sesama umat Islam.³⁹ Seorang aktivis dan jamaah masjid di Manado menambahkan bahwa dalam kajian-kajian yang diikutinya di HMI sejauh ini membuatnya berkesimpulan bahwa Islam liberal sebenarnya bukan Islam melainkan sebuah pemikiran *nyeleneh* yang membawa-bawa nama Islam.⁴⁰

Islam liberal dipandang oleh seorang imam masjid di Jakarta sebagai diskursus intelektual yang ruang lingkungannya harus dibatasi, dalam arti hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, misalnya komunitas akademik atau kalangan kampus. Sebab, kampus dinilai memiliki kebebasan untuk mengembangkan pemikiran sejauh apapun. Tapi kalau dibawa ke ranah masyarakat, maka Islam liberal dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan karena masyarakat kebanyakan tidak memiliki dasar pemikiran yang kuat.⁴¹ Pandangan bahwa Islam liberal hanya bisa didiskusikan di ranah akademik juga dibenarkan oleh Didin Baharuddin, Khatib Masjid Universitas Pattimura, Ambon. Ia menyatakan, “Salah dan benar di dunia akademik itu biasa. Beda dengan soal keyakinan. Kalau secara keilmuan Islam liberal itu memang memiliki landasan yang kuat, tidak masalah. Silakan saja. Tapi juga harus terbuka dengan kritik, sesuai dengan tradisi di dunia keilmuan.”⁴²

Ada juga yang melihatnya dari dua sisi: sisi manfaat dan sisi *mafsadat* (kerusakan). Dikatakan bahwa apabila Islam liberal memang ada manfaatnya boleh saja diambil. Namun apabila sebaliknya, lebih banyak menimbulkan kerusakan, terutama apabila mengganggu kemaslahatan agama, umat, dan bangsa, maka ia harus ditinggalkan.⁴³

Sementara itu pandangan para takmir terhadap Islam Nusantara atau Isnus juga bervariasi. Isnus sebagai wacana yang digagas oleh NU bahkan sempat menuai pro-kontra, bukan hanya di luar namun juga di kalangan NU sendiri. “NU periode sekarang ini berlebihan menurut

³⁹ Wawancara dengan Ustadz Imron Rosyidi, 13 Juli 2018

⁴⁰ Wawancara dengan Riri Rafika Domili, Jamaah Masjid Politeknik Negeri Manado, 15 Juli 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Deden Muhammad Ramdhan, Imam Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, 19 Juli 2018.

⁴² Wawancara dengan Didin Baharuddin, Khatib Masjid Universitas Pattimura, Ambon, 16 Juli 2018.

⁴³ Wawancara dengan H. Ceng Noval, Khatib dan Imam Masjid Agung Garut, Jawa Barat, 13 Juli 2018.

saya. Istilah-istilah seperti Islam Nusantara dimunculkan untuk apa, hanya bikin ribut. Saya lebih menokohkan Gus Dur saja, untuk yang sekarang kurang *sreg*.”⁴⁴ Ditambahkan oleh yang lain, “Kalau ada Islam Nusantara, nanti ada Nabi Nusantara juga *dong*.”⁴⁵

Beberapa alasan keberatan terhadap Islam Nusantara ialah kebaruan konsepnya yang potensial menjauh dari Islam orisinal yang diajarkan oleh Rasulullah dengan al-Quran, Hadits, dan tradisi para sahabat. Tidak heran jika Islam Nusantara dianggap sebagai suatu keteledoran dan langkah yang terlalu jauh. Dalam pandangan ini, Islam seharusnya tetap satu dan *kaffah*, tidak boleh dicampuradukkan dengan unsur-unsur di luar dirinya. Justru di sinilah fungsi wahyu yang akan menyatukan Islam dari berbagai belahan dunia. Kaum muslimin boleh berbeda-beda asal-asul, budaya, bahasa, dan bangsa. Namun ketika berbicara mengenai Islam maka hanya ada satu Islam. Budaya-budaya lokal yang melekat pada suatu masyarakat Islam harus diluruskan dan diletakkan pada rel Islam yang satu tersebut. Kalau labelnya berbeda-beda, seperti Islam Nusantara, maka justru akan membuat Islam makin terpecah-belah. ‘Kalau kita ibaratkan Islam itu rumah kita yang kemasukan tikus maka yang disingkirkan itu tikusnya, jangan rumahnya yang dibakar,’ tandas Ustadz H.M. Irwan, Takmir Masjid al-Jihad, Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁴⁶

Bahkan di Ambon, wacana Islam Nusantara pernah menjadi perdebatan yang cukup serius di kalangan tokoh-tokoh agama.⁴⁷ Mereka yang tampak moderat dalam berbagai isu yang ditanyakan oleh peneliti, justru berkeberatan dengan Islam Nusantara. Salah seorang penceramah di Masjid Nurul Iman Ambon, Asma Djaki, mengatakan bahwa umat Islam Indonesia tidak membutuhkan Islam Nusantara karena akan membuat kita terkotak-kotak. Padahal Islam itu universal. Ditambahkan bahwa Islam Nusantara itu merupakan satu bentuk perang pemikiran atau *ghazwul fikr* agar kita terus-menerus disibukkan oleh konflik internal.⁴⁸

Prinsip Islam *rahmatan lil-alamin* digunakan oleh Asma Djaki untuk menolak konsep Islam Nusantara yang justru menyempitkan semangat

⁴⁴ Wawancara dengan Deden Muhammad Ramdhan, Imam Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, 19 Juli 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan Taufiq Hidayat, Takmir Masjid As-Syuhada Universitas Trisakti, Jakarta 14 Juli 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Ustadz H.M. Irwan AW, 18 Juli 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Didin Baharuddin, 16 Juli 2018.

⁴⁸ Wawancara dengan Asma Djaki, Penceramah Masjid Nurul Iman, Ambon, 13 Juli 2018.

universal Islam. Bila ditelisik lebih jauh penolakan itu menyiratkan sebetulnya kekhawatiran karena munculnya wacana Islam Nusantara telah menimbulkan polemik berkepanjangan. Hal ini pula yang dikhawatirkan oleh Muhammad Lumala, Khatib Masjid Al-Wahyu, Ambon. Walaupun ia mengaku belum begitu memahami istilah ini, namun ia sangat mengkhawatirkan efek yang ditimbulkannya.⁴⁹

Pandangan lain terhadap Islam Nusantara datang dari Prof. Dr. Ir. H. Imron Zahri, M.S., Ketua Takmir Masjid Al-Ghazali, Palembang. Menurutnya, sebaiknya yang diwacanakan itu Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara yang terkesan sama sekali berbeda dengan Islam Arab. Sebab, tidak mungkin Islam dipisahkan dari Arab sebagai tempat kelahirannya. Dengan menyebut Islam di Nusantara, ujarnya, maka kita sebagai kaum Muslim di Indonesia menyadari adanya budaya-budaya kita yang berbeda dengan budaya Arab tanpa menolak Arab.⁵⁰

Hampir senada dengan itu ialah pendapat Riri Rafika Domili, jamaah Masjid Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, bahwa Islam Nusantara merupakan Islam di wilayah Nusantara yang sudah terkena sentuhan budaya. Ia mengatakan hal tersebut tidak masalah sepanjang tidak merusak jatidiri Islam itu sendiri. Riri mencontohkan bahwa di Manado ada kebiasaan dimana pendatang Muslim dari Gorontalo saat menyongsong hari terakhir puasa memasang lilin atau lampu botol di depan rumah. Itu lebih merupakan sebuah tradisi.⁵¹ Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Sartono Ahmad, seorang khatib di Ambon, dalam memahami persoalan ini. Ia mengaku sebenarnya tidak begitu memahami konsep ini, namun menurutnya Islam Nusantara adalah upaya menjaga tradisi, dan itu tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵²

Persepsi tentang Pancasila

Pada umumnya para responden menganggap Pancasila sebagai ideologi dan NKRI sebagai bentuk negara sudah final. Tidak ada masalah. Alasan yang dikemukakan cukup beragam, namun mengerucut pada sebuah konsensus kebangsaan yang memang

⁴⁹ Wawancara dengan Muhammad Lumala, 16 Juli 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. H. Imron Zahri, M.S., 14 Juli 2018.

⁵¹ Wawancara dengan Riri Rafika Domili, 15 Juli 2018.

⁵² Wawancara dengan Sartono Ahmad Assanusy, Penceramah Masjid Darun Na'im, Ambon, 15 Juli 2018.

diperlukan untuk persatuan NKRI yang terdiri dari ribuan suku bangsa dengan ribuan bahasa, budaya, dan keragaman agama. Hampir semua agama besar ada dan diakui di sini. Sulit dibayangkan kalau bangsa ini tidak memiliki pijakan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dianggap memadai sebagai ideologi pemersatu. Karena itu umat Islam sebagai penduduk mayoritas dianggap paling bertanggung jawab mengisinya dengan program-program kerja nyata yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tidak ada gunanya lagi umat Islam mempersoalkan Pancasila yang sudah disepakati sejak awal berdirinya bangsa ini, karena hal itu hanya membuang-buang waktu dan energi.⁵³ Selain itu, Pancasila juga merupakan hasil perjuangan umat Islam, termasuk para ulama, maka tidak ada satu pun sila-sila yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁴

Memang tidak sepenuhnya Pancasila dianggap ideal. Sebagian takmir masjid menilai Pancasila tidak menggambarkan nilai-nilai dari hukum-hukum Islam, namun lebih dapat dilihat sebagai sumber untuk hukum positif. Padahal hukum Islam dinilai cocok untuk bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, ditambah lagi fakta historis bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan umat Islam. Akan tetapi keberadaan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dinilai dapat menjadi titik beranjak untuk dibawa ke ranah pemberlakuan hukum Islam tersebut. “Jadi tinggal diterjemahkan saja sila Ketuhanan itu ke dalam poin-poin lain, sebab hukum Islam inilah sebenarnya yang cocok untuk semua,” ungkap Ustadz Abizal M. Yatim, Khatib Masjid Babut Taqwa Utama Polda Aceh, Kota Banda Aceh.⁵⁵

Tidak idealnya Pancasila juga dilihat dari aspek implementasinya, bukan jatidirinya sebagai konsensus kebangsaan. Dalam sejarahnya berkali-kali Pancasila “digembosi” oleh para rezim yang berkuasa. Akibatnya nilai-nilai yang mulia yang terkandung di dalamnya tidak tampak dalam kehidupan nyata dalam berbangsa dan bernegara. Korupsi yang terus merebak, dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di berbagai lapisan dan level pemerintahan adalah contoh betapa Pancasila hanya hiasan belaka dalam bernegara. Menurut

⁵³ Wawancara dengan Ustadz Jelen Jaelani, 14 Juli 2018.

⁵⁴ Wawancara dengan Ustadz Kosasih, Imam Masjid Al-Ishlah Kemekop UKM, Jakarta, 15 Juli 2018.

⁵⁵ Wawancara dengan Ustadz Abizal M. Yatim, 18 Juli 2018.

Deden Muhammad Ramdhan, Imam Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, dulu para pendiri bangsa susah payah mencari dasar negara yang dapat diterima oleh semua golongan yang sangat majemuk; sementara orang sekarang tinggal mempraktikkannya saja sulit sekali. Hal ini menunjukkan adanya degradasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, lanjut Deden, korupsi merajalela, penyalahgunaan kekuasaan merajalela, Pancasila ditaruh di laci meja.⁵⁶

Sebagai konsensus kebangsaan, Pancasila tidak diragukan lagi urgensinya oleh para responden. Bahkan sebagian dari mereka memiliki semacam silabus yang tidak tertulis untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada jamaah melalui beragam cara. Misalnya, mengundang penceramah tertentu yang dinilai memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan menitipkan pesan pada penceramah tersebut untuk menyisipkan nilai-nilai Pancasila di dalam ceramahnya. Dan sebaliknya, mereka akan hati-hati dengan penceramah dari luar yang diundang secara bebas. Untuk kasus ini, takmir akan melakukan semacam *sharing* gagasan sebelum acara. Tujuannya adalah, “Kita ingin menghindari perpecahan. Jangan sampai setelah acara ini umat jadi resah, terpecah-belah antara yang pro Pancasila dan yang pro-Khilafah, nanti yang rugi kita semua,” jelas Ustadz Umayan, Takmir Masjid Babul Hikmah, Mataram, Nusa Tenggara Barat.⁵⁷

NKRI dan Khilafah

Wacana tentang khilafah (negara Islam) pernah disuarakan oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sebuah organisasi massa yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Namun pembubaran organisasi tidak dengan sendirinya diikuti oleh pembubaran diri para pengikut atau anggotanya. Di kota-kota tempat penelitian ini dilakukan, anggota HTI diakui ada oleh para takmir dan menjadi jamaah masjid mereka. Namun mereka mengaku tidak khawatir, bukan saja karena di tempat mereka HTI itu kecil, bahkan di beberapa tempat nyaris tidak terlihat keberadaan, melainkan juga karena “HTI itu hanya organisasi, sedangkan orang-orangnya sama saja dengan kita, shalatnya juga sama dengan kita. Dan lagi kalau mereka bilang ingin khilafah bukan berarti besok pagi langsung membikin negara sendiri, kan?” Demikian

⁵⁶ Wawancara dengan Deden Muhammad Ramdhan, 18 Juli 2018.

⁵⁷ Wawancara dengan Ustadz Umayan, 16 Juli 2018.

pertanyaan retorik dikemukakan oleh Hadi Purwanto, Takmir Masjid Darun Naim, Ambon, Maluku.⁵⁸

Pandangan Yunus Rahawarin, sama-sama tokoh agama di Ambon, kurang lebih senada. Menurut dia, HTI itu masih merupakan satu konsep belaka, kenapa harus ditakuti. Di zaman Presiden Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, mereka tidak dipermasalahkan karena tidak digubris, kenapa sekarang divonis dan dianggap radikal. Yusuf melihat ada yang tidak beres pada rezim sekarang dalam memahami persoalan. Kalau memang HTI itu dianggap mengancam eksistensi NKRI, ujarnya, mengapa tidak dari dulu dibubarkan, dan baru sekarang. Mungkin rezim-rezim yang dulu menganggap HTI itu hanya sebagai pengajian saja sehingga tidak terlalu dianggap sebagai masalah.⁵⁹

Ada juga yang memandang HTI dari aspek sejarahnya. Sesuai dengan keyakinan HTI sendiri bahwa munculnya khilafah merupakan takdir atau suatu keharusan. Jadi pandangan orang bahwa khilafah itu ilusi atau perjuangan yang sia-sia, bagi HTI hal tersebut bukan masalah, sebab yang mereka lakukan adalah sebuah ikhtiar untuk mewujudkan takdir tersebut.⁶⁰ Syarif Hidayat, aktivis masjid yang lain, mencoba mengambil pandangan yang moderat. Menurutnya, kalau memang kelompok ini [HTI] terbukti bersalah, dan dapat dibuktikan bahwa mereka memang benar-benar melakukan penyimpangan, sebaiknya memang dibubarkan. Tapi, tambahnya, hal itu juga berlaku untuk Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain.⁶¹

Pandangan yang cukup keras terhadap HTI datang dari lingkungan masjid di Manado. Di kota ini sebenarnya HTI tidak terlalu menonjol. Kaum Muslim di sini, menurut para takmir, sangat ketat dengan aliran Sunni, dan HTI dianggap bukan Sunni. Tidak hanya itu, HTI juga dinilai tidak fokus pada agama, melainkan mencampuradukkan agama dengan politik. Menurut Ustadz Ngadikin Iskandar, takmir Masjid Kampus Ulul Albab, Universitas Sam Ratulangi, Manado, keberadaan HTI bisa menimbulkan konflik, karena membawa-bawa politik dan senang membida'ahkan orang lain.⁶² Takmir lain menambahkan bahwa

⁵⁸ Wawancara dengan Hadi Purwanto, 14 Juli 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan Yunus Rahawarin, Takmir Masjid Universitas Pattimura, Ambon, 16 Juli 2018.

⁶⁰ Wawancara dengan Erni H dan Vonny Putri, Aktivis Masjid Al-Ghazali Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, 15 Juli 2018

⁶¹ Wawancara dengan Syarif Hidayat, Aktivis Masjid Raya At-Taqwa, Kota Palembang, 15 Juli 2018.

⁶² Wawancara dengan Ngadikin Iskandar, 12 Juli 2018.

beberapa tahun lalu pernah ada HTI di Manado tapi kemudian menghilang karena dibubarkan oleh Banser NU Sulawesi Utara.⁶³

Literasi untuk Kaum Muda

Dengan potret literasi keagamaan seperti di atas, di manakah posisi kaum muda di lingkungan masjid? Keterlibatan kaum muda dalam kegiatan-kegiatan masjid menjadi harapan semua takmir. Namun demikian, harapan itu tidak selalu dapat diwujudkan pada banyak masjid karena berbagai faktor seperti minat atau antusiasme kaum muda itu sendiri yang rendah, program literasi masjid yang tidak menarik buat anak-anak muda, serta masalah klasik: keterbatasan dana dan sarana. Yang terakhir ini khususnya terlihat dari tidak adanya organisasi remaja masjid sebagai tempat untuk kaum muda melibatkan diri secara intensif dalam kegiatan-kegiatan masjid. Di Jakarta, misalnya, dari lima masjid yang diteliti, hanya dua yang memiliki organisasi remaja masjid yang menggawangi program kreatif yaitu, Masjid Raya Bintaro Jaya dan Masjid Agung Sunda Kelapa. Sedangkan masjid lain, jangankan memiliki program kreatif, kelompok/organisasi remaja masjid pun belum berjalan bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Masjid Raya Bintaro Jaya memiliki organisasi resmi remaja Masjid, yaitu REMINSYA (Remaja Masjid Bintaro Jaya). Menurut Zega, Kepala Departemen Entrepreneur REMINSYA, program kreatif yang diadakan oleh Reminsya di antaranya adalah: Talk Show Bersama Artis, Kajian Muda Mudi (KMM), Kantin Pintar, dan Gerakan Pemuda Subuh. Sedangkan Masjid Agung Sunda Kelapa memiliki RISKa (Remaja Mesjid Sunda Kelapa). RISKa berdiri pada tahun 1974 dan memiliki semboyan “Muda Gaul dan Berkarya”. Dalam profilnya mereka mendefinisikan diri sebagai organisasi pemuda progresif yang datang untuk mempelajari Islam dan mengeskplor hobi-hobinya dalam bidang seni, olahraga, jurnalistik, kesehatan, dan aktivitas sosial. Adapun program-program unggulan mereka adalah: SDTNI (Studi Dasar Terpadu Nilai Islam), BMAQ (Bimbingan Mahir Baca Al-Quran), Riska Peduli (santunan fakir miskin atau bencana alam), AAR (Adik Asuh Riska), SDIS (Studi Dasar Islam Siswa), Tifhan Pokan (seni bela diri Islam), *Vocal Class* (bernyanyi dan bermusik), Sister Club (khusus remaja putri), dan lain-lain.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Agung Zulfiqor, Remaja Masjid Awwal Fathul Mubin, Manado, 12 Juli 2018.

⁶⁴ Fahmi Syahirul Alim, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib DKI Jakarta”, Agustus 2018.

Di masjid-masjid di Banda Aceh, literasi keagamaan anak-anak muda lebih banyak diadakan di sekolah dan kampus, daripada di masjid. Kegiatan yang melibatkan kaum muda di masjid seperti pengajian dan hafalan Quran ditangani oleh para takmir masjid bersangkutan.⁶⁵ Sementara itu di Palembang sebagian masjid memiliki organisasi remaja masjid dan sebagian lagi tidak. Namun demikian semua takmir selalu melibatkan kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial seperti khitanan, pernikahan (baik sebagai panitia maupun pengisi acara seperti menjadi MC dan menjadi qari), dan pelaksanaan kegiatan lomba saat bulan ramadhan dan menjelang Nuzulul Quran, dan lain-lain.⁶⁶ Bedanya, masjid-masjid yang memiliki organisasi remaja masjid lebih mudah mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan anak-anak muda dibandingkan dengan masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid.

Di Manado, perhatian terhadap anak-anak muda secara umum masih kurang, terutama di masjid yang tidak memiliki “jamaah tetap” seperti Masjid Raya Ahmad Yani dan Masjid R. A. Kartini. Di sini aktivitas jamaah kaum mudanya terbatas lantaran akses yang jauh dari perumahan warga muslim. Sementara masjid yang dekat atau di tengah komunitas mayoritas Muslim seperti Masjid Awwal Fathul Mubin di Kelurahan Islam dan Masjid al-Masyhur di Kelurahan Istiqlal (Kampung Arab), aktivitas anak muda cukup ramai. Unit remaja masjid masing-masing memiliki program rutin berupa pengajian dan pembelajaran untuk anak-anak. Di kedua masjid ini, remaja masjid mengelat kegiatan sosial budaya seperti pengembangan tradisi hadhrah dan olah raga. Grup Hadhrah Masjid al-Masyhur sering diundang ke acara-acara warga yang sedang mengadakan hajjat pernikahan atau pada acara-acara seperti Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan lain-lain. Latihan hadhrah Remaja Masjid al-Mashur dilakukan di rumah anggotanya secara bergilir. Sementara, latihan hadhrah anak-anak dilakukan setiap Kamis malam bersamaan dengan acara shalawatan kaum bapak.⁶⁷

⁶⁵ Nurchalis Sofyan, “Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Banda Aceh”, Agustus 2018.

⁶⁶ Idris Hemay, “Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Palembang”, Agustus 2018.

⁶⁷ Ubed Abdilah Syarif, “Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Manado”, Agustus 2018.

Walaupun hanya sedikit masjid yang memiliki organisasi remaja masjid, kaum muda Muslim di Manado tidak tinggal diam. Ada beberapa gerakan anak muda yang memiliki orientasi pada dakwah dan menjadikan masjid sebagai sasaran atau media utamanya karena beberapa alasan, antara lain kurangnya aktivitas di lingkungan masjid, masjid kurang “makmur”, serta kurangnya pendidikan keislaman bagi anak-anak di lingkungan masjid. Dua di antaranya ialah:

1. Ikatan Pemuda Remaja Assalam (IPRA)

IPRA adalah organisasi yang diinisiasi oleh anak-anak muda yang berawal dari pesantren/lembaga pendidikan Islam Assalam. IPRA memiliki program yang khusus menyasar anak-anak muda khususnya remaja melalui pendampingan bagi unit-unit Kerohanian Islam (ROHIS) di sekolah-sekolah tingkat menengah (SMA). Alasannya adalah minimnya materi pengajaran keislaman dan guru-guru Islam di lingkungan pendidikan sekolah di kota Manado. Program lainnya adalah pendampingan bagi penyelenggara pendidikan Islam di usia dini (PAUD) di masjid-masjid (mushalla) khususnya di daerah yang jauh dari komunitas muslim. Sementara program yang terkait langsung dengan masjid antara lain mengirim ustadz/imam dan penceramah (khatib) ke masjid-masjid di daerah jauh dari pusat komunitas muslim untuk jangka tertentu. Secara aliran dan faham keislaman, IPRA tidak berafiliasi ke salah satu organisasi keislaman dan cenderung mengenyampingkan ego aliran atau organisasi. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa jika fokus pada aliran atau organisasi keagamaan tertentu maka justru akan mengurangi atau menghalangi aliran atau organisasi lain untuk bergabung. *Ahlussunnah wal jamaah* adalah asas atau pegangan bersama jalannya gerakan IPRA. Argumen-argumen naratif yang menjurus pada khilafiyah cenderung dihindari, lebih pada pengajaran atau pemahaman ajaran-ajaran dasar keislaman dan keimanan (tauhid dan fiqh dasar). Selain itu, metode yang digunakan dalam gerakan ataupun pelatihan-pelatihan IPRA adalah gaya sederhana, menyenangkan dan dekat dengan anak-anak muda (milenial).⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Rizaldi Pedju, pengurus IPRA, 14 Juli 2018.

2. HARTA-SAINS

HARTA-SAINS adalah sebuah gerakan (*harakah*) kegiatan keislaman yang digagas dan diinisiasi oleh seorang da'i (penceramah muda) bernama Rizal Kasim (32 tahun), asal Gorontalo, dan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Sam Ratulangi. Ia mengaktifkan Badan Tadzkir (Lembaga Dakwah) di beberapa fakultas, dan berupaya menggandeng beberapa organisasi kemahasiswaan seperti HMI, KAMMI, IMM dan lain-lain. Meskipun sempat menjadi ketua KAMMI Komisariat Unsrat, namun kemudian ia melepaskan diri dari KAMMI dengan alasan tidak ingin terikat pada salah satu organisasi sehingga menghalangi dakwahnya ke kelompok atau masyarakat lain. Ia mengajak dan menghimpun organisasi Badan Tadzkir dari beberapa kampus untuk mengadakan acara-acara bersama, sehingga tercetuslah nama Himpunan Remaja Tadzkir Akbar (HARTA).

Kegiatan dakwahnya berkembang dan meluas ke lingkungan birokrasi, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Rizal membangun komunikasi dan menjadikan Kepolisian sebagai mitra dalam berdakwah. Dengan membangun mitra dengan pihak kepolisian Rizal menawarkan gagasan “menjaga nama baik Islam” apalagi dalam konteks Manado sebagai kota toleran dan mayoritas populasinya adalah non-muslim. Rizal berhasil bermitra dan berkomunikasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sehingga ia dipercaya sebagai imam masjid (Unit Kerohanian Islam) di lingkungan Polda dan sebagai “Da'i Polda” Sulawesi Utara. Rizal menyebut masjid Polda sebagai Markas Besar SAINS (gerakan puasa Senin-Kamis) yang rutin mengadakan buka bersama dengan para polisi Muslim yang ikut berpuasa dan masyarakat sekitar.⁶⁹

Demikianlah walaupun di Manado hanya sedikit saja masjid yang memiliki organisasi remaja masjid, kaum mudanya tetap aktif mencari alternatif terhadap literasi keagamaan di masjid yang dianggap mandeg dan kurang menarik bagi generasi milenial.

Di atas dikemukakan bahwa masjid-masjid yang diteliti di Banda Aceh pada umumnya tidak memiliki organisasi remaja masjid. Hal yang sama juga terjadi di Ambon, dimana masjid-masjidnya baik yang besar

⁶⁹ Wawancara dengan Rizal Kasim, 14 Juli 2018.

maupun kecil tidak memiliki organisasi remaja masjid.⁷⁰ Begitu juga di Mataram, dimana pelibatan anak-anak muda dalam kegiatan masjid hanya bersifat sporadis dan insidental atau pada acara-acara tertentu seperti peringatan hari-hari besar Islam, karena memang di sini tidak ada organisasi remaja masjid.⁷¹ Sementara itu di Garut-Tasikmalaya hanya Masjid Agung Garut yang memiliki organisasi remaja masjid.⁷²

Singkatnya, ada kesamaan di antara masjid-masjid yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yakni absennya organisasi remaja masjid. Hal ini agak mengherankan karena organisasi-organisasi remaja masjid memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun kreativitas keberagamaan kaum muda di masjid. Pada gilirannya kondisi ini berimbas pada jauhnya mereka dari masjid sehingga aktivitas-aktivitas yang bernuansa kepemudaan kurang tampak bergelora di masjid-masjid.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan di tujuh kota, yakni: Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Garut-Tasikmalaya, Manado, Ambon, dan Mataram, dalam kaitannya dengan moderasi Islam. Tema-tema yang dimunculkan dalam penelitian ialah toleransi (antaragama dan intra umat Islam), perdamaian, dan anti-kekerasan, dan tema-tema kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, dan *Kebhinnekaan*.

Penelitian menemukan bahwa literasi keagamaan di masjid-masjid masih bercorak konvensional, yaitu dalam media pengajian, khutbah, dan ceramah. Begitu pula muatannya yang secara garis besar mengarah ke pengajaran akidah dan fikih dalam arti konvensional. Yakni, untuk kebutuhan praktik ibadah sehari-hari. Jarang sekali ditemukan literasi keagamaan yang secara khusus mengarah kepada isu-isu toleransi (antaragama dan intra umat Islam), perdamaian, dan anti-kekerasan, dan tema-tema kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, dan *Kebhinnekaan*.

Literasi keagamaan di masjid-masjid tidak menjadi perhatian khusus dari kantor Kementerian Agama maupun Dewan Masjid Indonesia. Pola perekrutan narasumber penceramah/khatib biasanya melalui rapat

⁷⁰ Muchtadlirin, "Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Ambon", Agustus 2018.

⁷¹ Abdul Wahid, "Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Mataram", Agustus 2018.

⁷² Mohamad Nabil, "Laporan Needs Assessment, Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya", Agustus 2018.

pengurus atau membicarakan dengan dewan penasihat masjid. Tidak jarang rapat mencoret nama tertentu yang diajukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, misalnya karena penceramah/khatib tersebut berkecenderungan radikal.

Penelitian ini menemukan bahwa masjid-masjid pada umumnya menolak isu-isu politik dibawa ke masjid karena akan memecah-belah umat. Para takmir juga memiliki peraturan tidak tertulis bahwa para penceramah atau khatib tidak boleh membahas satu madzhab tertentu, tidak boleh berbicara SARA, dan tidak boleh menghujat kelompok atau agama lain.

Terkait isu-isu kebangsaan seperti Pancasila sebagai ideologi negara, para takmir, imam dan khatib nyaris tidak ada perbedaan. Mereka sepakat menerima karena Pancasila dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Begitu pula isu hubungan antaragama yang dinilai penting untuk terus dipupuk dan dijaga. Doktrin yang dipegang oleh semua takmir, khatib, dan imam ialah ayat Quran *lakum dinukum waliyadin* (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Namun untuk kasus Syiah, Salafi, Islam Liberal, dan Islam Nusantara, pandangan para takmir, khatib, dan imam berbeda-beda. Sebagian besar mereka menolak, sebagian kecil memberi toleransi dengan syarat tertentu. Khusus untuk kasus Ahmadiyah semuanya sepakat untuk menolak karena dianggap menyimpang dari Islam.

Sebagian masjid memiliki organisasi remaja masjid atau ikatan remaja masjid, namun sebagian besar tidak memilikinya. Akibatnya kaum muda jarang terlibat dalam aktivitas literasi masjid. Pada saat bersamaan aktivitas literasi masjid cenderung monoton dan tidak menarik minat kaum muda. Namun demikian terdapat sejumlah *best practices* bagi literasi keagamaan kaum muda, seperti organisasi Remaja Masjid Raya Bintaro dan Masjid Sunda Kelapa di Jakarta. Sementara itu IPRA di Manado bergerak di luar masjid, karena memang bukan organisasi remaja masjid, namun memiliki aktivitas yang melibatkan kaum muda dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Di Banda Aceh, dimana tidak ada organisasi remaja masjid, kaum muda lebih banyak menghabiskan waktunya di warung kopi. Bahkan para takmir masjid pun berbaur dengan kaum muda di warung-warung kopi khususnya sehabis shalat subuh. Dalam situasi yang bersahabat dan

tidak formal, kaum muda lebih mudah diajak berdiskusi. Jadi warung kopi merupakan tempat yang cocok untuk literasi keagamaan. Di daerah-daerah lain nyaris tidak ditemukan *best practices*.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang diajukan terhadap para pemangku kepentingan terkait dengan literasi keagamaan di masjid:

1. Pemerintah dalam hal ini Kemenag harus mengeluarkan Peraturan yang jelas terkait masjid dan perangkatnya (takmir, imam, khatib). Saat ini baru dikeluarkan Surat Keputusan dari Dirjen Bimas Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid yang masih bersifat normatif dan belum menyentuh hal substansial.
2. Pemerintah dan para *stakeholders* perlu melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap takmir-takmir masjid dalam hal manajemen atau pengelolaan sehingga masjid bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi kegiatan-kegiatan sosial dan keilmuan.
3. Para takmir hendaknya melibatkan kaum muda dalam aktivitas literasi keagamaan mereka; dan lebih baik bila setiap masjid memiliki organisasi remaja masjid sebab dengan cara begitu kaum muda dapat membuat sendiri aktivitas-aktivitas literasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalaupun tidak memiliki organisasi remaja masjid, para takmir dapat melakukan inovasi dalam aktivitas literasi keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kaum muda.
4. Pemerintah dan para *stakeholders* hendaknya melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap takmir-takmir masjid, khususnya dalam hal pengembangan pengetahuan dan wawasan dalam isu-isu toleransi, perdamaian, dan amti-kekerasan untuk menunjang tegaknya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Demikian juga wawasan mereka mengenai dakwah bernuansa milenial yang masih memerlukan pembekalan baik dari sisi materi maupun metode.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Fahmi Syahirul, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib DKI Jakarta”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.
- Alimi, Moh. Yasir, *Mediatisasi Agama, Post-Truth, dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*, Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Al-Makassary, Ridwan, dan Ahmad Gaus AF (editor), *Benih-benih Islam Radikal di Masjid. Studi Kasus Jakarta dan Solo*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2010.
- Hemay, Idris, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Palembang”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, terjemahan*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- <https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/19/indonesia-mosques-spreading-radicalism-to-government-workers-official.html>, “Indonesia mosques spreading radicalism to government workers”, November 19, 2018, diakses 19 Januari 2019.
- Makruf, Jamhari, dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muchtadlirin, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Ambon”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.
- Mulkhan, Abdul Munir, dan Bilveer Singh, *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam dalam Peradaban Modern*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011
- Nabil, Mohamad, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.

- Roller, Margaret R., Lavrakas, Paul J., *Applied Qualitative Research Design: A Total Quality Framework Approach*, New York: The Guilford Press, 2005.
- Sofyan, Nurchalis, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Banda Aceh”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.
- Syarif, Ubed Abdilah, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Manado”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.
- Wahid, Abdul, “Laporan Needs Assessment Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam, dan Khatib Kota Mataram”, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, Convey Indonesia, PPIM UIN Jakarta, dan UNDP, Agustus 2018.

PROFIL PENULIS

Irfan Abubakar, sejak 2010 hingga sekarang menjabat Direktur CSRC UIN Syafif Hidayatullah Jakarta. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini adalah seorang akademisi dengan minat keilmuan yang luas dalam kajian humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Menamatkan S1 Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Jakarta (1995), Irfan melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan meraih magister di bidang Studi-studi Keislaman di universitas yang sama (1999). Pada tahun 2000 mengikuti *joint research* tentang Filsafat Islam dan Fenomenologi di Faculty of Arts, McGill University, Montreal, Canada.

Setelah bergabung ke CSRC tahun 2003, Irfan belajar tentang resolusi konflik di *AMAN's School of Peace Studies and Conflict Resolution* di Bangkok, Thailand (2005). Minatnya pada isu-isu konflik mengantarkan dia mengikuti *Advance Course* dalam bidang *Security Studies* di APCSS, Honolulu, Hawaii (2015). Jebolan Pesantren Gontor ini telah menulis dan menyunting banyak buku dan modul pelatihan seputar ragam tema, mulai dari Filantropi Islam, Islam dan Perdamaian, Resolusi Konflik, Islam dan HAM, hingga Islam dan Demokrasi. Dia juga meneliti dan menulis beberapa artikel di media seputar isu *Hate Speech*. Berkat karya-karyanya tersebut tahun 2011 Irfan dinobatkan oleh *Majalah Campus Indonesia* (Agustus, Vo. 5) sebagai satu diantara 20 akademisi top Indonesia (untuk bidang humaniora) di bawah usia 45 tahun. Sebagai ahli ujaran kebencian, beberapa tahun terakhir Irfan Abubakar secara reguler diminta menjadi narasumber di berbagai seminar dan pelatihan yang diikuti oleh para perwira POLRI.

Ahmad Gaus AF, merupakan penulis, peneliti, dosen, dan aktivis. Sehari-hari bekerja di Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Sejak mahasiswa telah menggeluti dunia tulis-menulis. Lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. Selain menulis buku ia juga menulis artikel dan kolom di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Karya, Majalah Gatra, Matra, Gamma, Panji, Jurnal Kultur, Jurnal Afkar, dan lain-lain. Sebagian besar bukunya bertema agama, politik, sastra, dan kebudayaan. Belakangan ia banyak menulis biografi tokoh-tokoh nasional

seperti: Nurcholish Madjid (Cendekiawan), Djohan Effendi (mantan Mensesneg), Taufiq Effendi (mantan MenPan), Utomo Dananjaya (Pakar Pendidikan), Farouk Muhammad (Jenderal Polisi), Koes Hadinoto (Ahli Radar), Jusuf Talib (Politisi). Alumnus Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta yang pernah nyantri di Pesantren Daar el-Qolam, Banten, ini adalah Pemimpin Redaksi Penerbit Paramadina (1999-2004) dan Direktur Publikasi dan Jaringan Internasional pada *LibForAll Foundation*, Amerika Serikat (2005-2008). Ia juga menjadi pembicara dalam berbagai forum seminar baik di dalam maupun luar negeri; sejak 2007 sampai sekarang mengajar mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan di Swiss German University (SGU), BSD City, Tangerang. Buku kumpulan puisinya berjudul *Kutunggu Kamu Di Cisadane: Antologi Puisi Esai* (KomodoBooks, 2012). Ia meredaksi kumpulan puisi dan esai karya para mahasiswanya di SGU yang diterbitkan dengan judul *ISTANA ANGIN: Bunga Rampai Puisi Kampus* (LotusBooks, 2011), dan diberi kata pengantar oleh penyair senior Prof. Sapardi Djoko Damono. Saat ini ia aktif mengadakan workshop pelatihan menulis di berbagai pesantren/sekolah dan kampus dengan menggunakan metode *WriteNow!* yang diambil dari buku karyanya: *Writerpreneurship: Bisnis dan Idealisme di Dunia Penulisan* (2013). Buku puisi terbarunya “*Senja di Jakarta*” terbit November 2017. Ia juga banyak menulis sebagai *ghost writer*. Kontak Mobile: 0857-5043-1305; Email: gauslsf@gmail.com, dan Facebook gausaf@yahoo.com; Twiter @AhmadGaus; Blog www.ahmadgaus.com.

TENTANG CSRC

Center for the Study of Religion and Culture/CSRC (Pusat Kajian Agama dan Budaya) adalah lembaga kajian dan riset di bidang agama dan sosial-budaya, didirikan berdasarkan SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 April tahun 2006. Pusat ini merupakan pengembangan dari bidang budaya pada Pusat Bahasa dan Budaya (PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999-2006), mengingat semakin meningkatnya tuntutan untuk mengembangkan kajian dan penelitian agama (terutama Islam) dalam relasi-relasi sosial-budaya dan politik. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja peran penting yang dapat disumbangkan agama guna mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, kuat, demokratis, dan damai.

Pentingnya pengembangan ini dapat dicermati dari semakin meningkatnya peran dan pengaruh agama di ruang publik. Dari hari ke hari, agama tidak saja menjadi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga pengaruhnya semakin menguat di ruang publik, di tengah derasnya arus modernisasi dan sekulerisasi.

Salah satu bukti menguatnya agama di ruang publik adalah tumbuhnya identitas, simbol, dan pranata-pranata sosial yang bercirikan keagamaan. Ekspresi Islam, harus diakui, mendapat tempat cukup kuat dalam ruang publik di tanah air. Namun demikian, Islam bukanlah satu-satunya entitas di dalam ruang tersebut; terdapat juga entitas-entitas lain yang ikut meramaikan wajah ruang publik kita. Sebagai ajaran, sumber etik, dan inspirator bagi pembentukan pranata-pranata sosial, Islam acap tampil dalam ekspresinya yang beragam, sebab ia dipraktikkan berdasarkan multi-interpretasi dari komunitas-komunitas Muslim yang memiliki latar-belakang yang berbeda. Alhasil, dari sumber yang beragam itu, lahirlah banyak tafsiran dan aliran Islam; karena itu pula ajaran dan nilai-nilai agama yang luhur ini seringkali diamalkan dalam warna dan nuansa yang khas. Adakalanya ia tampil dalam berbagai potret eksklusivisme, namun tidak jarang juga hadir sebagai sumber etika sosial, inspirator bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mediator bagi integrasi sosial, serta motivator bagi pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat madani. Islam juga mempengaruhi pembentukan pranata-pranata sosial-politik, ekonomi, dan pendidikan yang sedikit banyak punya andil positif bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kehadiran Islam di ruang publik tidak perlu dirisaukan. Sebaliknya etika dan etos agama seperti itu perlu diapresiasi oleh masyarakat dan dukungan semua pihak, terutama pemerintah.

Kehadiran CSRC bertujuan untuk merevitalisasi peran agama dalam konteks seperti itu. Agama harus diaktualkan dalam wujud etika dan etos sekaligus, guna mewarnai pembentukan sistem yang baik dan akuntabel. Ke depan, transformasi agama secara berhati-hati perlu dilakukan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat, yang dari hari ke hari tampak semakin kompleks, di tengah derasnya gelombang perubahan sosial dan globalisasi. Mengingat arus perubahan berlangsung lebih cepat dari kemampuan umat untuk meng-upgrade kapasitasnya, maka perlu strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Sesuai tugas dan perannya, CSRC mencoba memberi kontribusi di sektor riset, informasi, dan pelatihan serta memfasilitasi berbagai inisiatif yang dapat mendorong penguatan masyarakat sipil melalui pengembangan kebijakan (*policy development*) di bidang sosial-keagamaan dan kebudayaan. Diharapkan, ke depan, institusi-institusi Islam berkembang menjadi pusat produktivitas umat (*production center*), dan bukan malah menjadi beban sosial (*social liability*). Dengan demikian diharapkan umat Islam dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi secara positif dan konstruktif.[]



**Enhancing the Role of Religious Education in
Countering Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 217499272 | Fax: +62 217408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.
Resilient nations.*